PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jl. Perintis Kemerdekaan / BGR I No. 3 Jakarta Utara
Telp. 458 48014 – 458 48055 – 458 48011 – 453 4313 – 458 76685 Fax. 458 48014
Website http://disppkukm.jakarta.go.id/. E-mail: disppkukm@jakarta.go.id
JAKARTA
Kode Pos 14240

Nomor : 5734/-1.712.1
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2021 Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

19 Oktober 2021

Kepada
Yth. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Bappeda Nomor 1506/-1.712.1 tanggal 23 September 2021 perihal permintaan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Dinas PPKUKM
Perindustrian Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah

Jak Preneur
Jakarta
a city of collaboration

DOKUMEN RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENJA TAHUN 2021

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Perindustrian, urusan Perdagangan serta urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi DKI Jakarta

Ir. Elisabeth Ratu Rante Allo, M.M, M.Si

NIP 197009241998032004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Daftar Tabel 4
Daftar Gambar 5
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 7
1.2. Maksud dan Tujuan 7
1.3. Metodologi 8
1.4. Ruang Lingkup 8
1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMDAI DENGAN TRIWULAN KE-II TAHUN 2021
2.1. Keselarasan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renstra Perubahan Dinas PPKUKM dan Renja Dinas PPKUKM Tahun 2021 .. 11
2.2. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah 17
2.3. Faktor Pendorong dan Penghambat 33
2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 33
2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 40
2.6 Isu-Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan 45
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 49

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB IV PENUTUP 227

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Keselarasan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan antara Renstra Perubahan 2020 – 2022 Dinas PPKUKM dengan Renja PPKUKM 13
Tabel 2 Keselarasan Program Renstra dan Program Renja Perangkat Daerah 14
Tabel 3 Data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada Dinas PPKUKM 20
Tabel 4 Data Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Triwulan-II Tahun 2021 28
Tabel 5 Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 41
Tabel 6 Isian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran TW-n 17
Gambar 2 Grafik Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Subkegiatan 27
Gambar 3 Mekanisme Penyusunan APBD 52

PENDAHULUAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) mencakup penilaian terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Penilaian dimaksud berupa realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran dan penyerapan dana serta kendala yang dihadapi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan untuk mengawal pelaksanaan Renja-Perangkat Daerah terutama terhadap Perubahan dari Rancangan Awal Renja, capaian kinerja program/kegiatan/subkegiatan, dan penyerapan dana/anggaran indikatif kegiatan Renja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Menilai keselarasan program Renja-Perangkat Daerah dengan Renstra-Perangkat Daerah;

2. Mengidentifikasi Perubahan Renja dari Rancangan Akhir Renja 2021 akibat Refocusing Anggaran dan Target Kinerja, Pemotongan Anggaran, dan lain-lain;
3. Mengidentifikasi capaian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
4. Menentukan langkah-langkah tindaklanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dengan target yang sudah direncanakan.
5. Menjadi bahan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.

1.3 Metodologi

Dalam menyusun Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menggunakan data kinerja yang terdapat pada sistem SAKIP, Sistem MONEV dan Data Perubahan Anggaran dari Berita Acara Hasil Penajaman Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2021.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ke-II Tahun berkenaan;
3. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

SAMPAI TRIWULAN KE-II TAHUN 2021

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sampai Triwulan ke-2 tahun 2021; analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

EVALUASI RENJA SAMPAI DEGAN TRIWULAN KE-II TAHUN 2021

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE-II TAHUN 2021

2.1 Keselarasan Program/Kegiatan/Subkegiatan antara Renstra Perubahan Dinas PPKUKM dan Renja Dinas PPKUKM Tahun 2021

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan gabungan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Serta Perdagangan dengan Bidang Perindustrian dari Dinas Perindustrian dan Energi sebagaimana diatur di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Setelah penggabungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki 9 Program dan dengan adanya Permendagri No 90 Tahun 2019, Dinas PPKUKM memiliki 11 Program dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Program Dinas PPKUKM sebelum Permendagri No 90 Tahun 2019	Program Dinas PPKUKM sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019
Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	1. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program Pembinaan Kewirausahaan dan Pengembangan UKM	1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 2. Program Pengembangan UMKM
1. Program Pembinaan dan Pengembangan Industri 2. Program Pengawasan dan Pengendalian Industri	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
Program pengawasan dan pelayanan perdagangan	1. Program Pengembangan Ekspor 2. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah 2. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah 3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perindustrian 4. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perindustrian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Program Dinas PPKUKM sebelum Permendagri No 90 Tahun 2019	Program Dinas PPKUKM sesuai Permendagri No 90 Tahun 2019
5. Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Perdagangan 6. Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Perdagangan	

Tabel 1. Keselarasan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiatan antara Renstra Perubahan 2020 – 2022 Dinas PPKUKM dengan Renja PPKUKM

No	Renstra Perubahan 2020 - 2022			Renja Tahun 2021		
	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	9 Program	19 Kegiatan	38 Sub Kegiatan	11 Program	22 Kegiatan	41 Sub Kegiatan

Jumlah Program di Renstra perubahan 2020 – 2022 untuk Tahun 2021 terdiri dari 9 Program, 19 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan saja, berbeda dengan Renja Tahun 2021 yang memuat 11 Program, 22 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan. Perbedaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Renja tapi tidak ada di Renstra adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
4. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
5. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Sertifikasi
6. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
7.

Perbedaan Jumlah Kegiatan dan Sub Kegiatan ini terjadi karena adanya perubahan pemetaan Kegiatan sesuai arahan Bappeda yang dilakukan dalam penyusunan Renstra Perubahan 2020-2022 setelah Renja selesai disusun.

Tabel 2. Keselarasan Program Renstra dan Program Renja Perangkat Daerah

Kode	Renstra Perubahan 2020 - 2022		Kode	Renja Tahun 2021	
	Program	Indikator Program		Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	A.2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian
A.2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	A.2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi
A.2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	A.2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
A.2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis	A.2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis
A.3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	A.3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta
A.3.30.06 B.3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kode A : 1. persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	A.3.30.06 B.3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kode A : 1. persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti

Kode	Renstra Perubahan 2020 - 2022		Kode	Renja Tahun 2021	
	Program	Indikator Program		Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang 3. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi Kode B : 1. Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi			2. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang 3. Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi Kode B : 1. Jumlah pasar yang menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi
A.3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri	A.3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri

Kode	Renstra Perubahan 2020 - 2022		Kode	Renja Tahun 2021	
	Program	Indikator Program		Program	Indikator Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Jumlah wirausaha industri baru 2. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif 3. Persentase jumlah IKM yang berkualitas 4. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	A.3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Jumlah wirausaha industri baru 2. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif 3. Persentase jumlah IKM yang berkualitas 4. Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya
A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. indeks kepuasan pelayanan kantor 2. indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	A.3.31.01 B.3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. indeks kepuasan pelayanan kantor 2. indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional

Secara keseluruhan indikator proram di Renstra Perubahan Dinas PPKUKM Tahun 2020 – 2022 sama dengan Renja Tahun 2021. Perbedaannya terletak dari adanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdapat di Renja seperti penjelasan sebelumnya.

2.2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah

Pada bagian ini Perangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada tahun berjalan. Data yang disajikan pada bagian ini merupakan data realisasi program, kegiatan dan subkegiatan.

2.1 Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah

Berikut adalah disajikan grafik capaian kinerja (Realisasi Fisik) dan persentase serapan anggaran (Realisasi Keuangan) seluruh program yang berisikan subkegiatan dan Rincian Sub Kegiatan yang tercantum pada Rencana Kerja (Renja) dalam bentuk grafik sebagaimana ***terlampir*** di bawah ini.

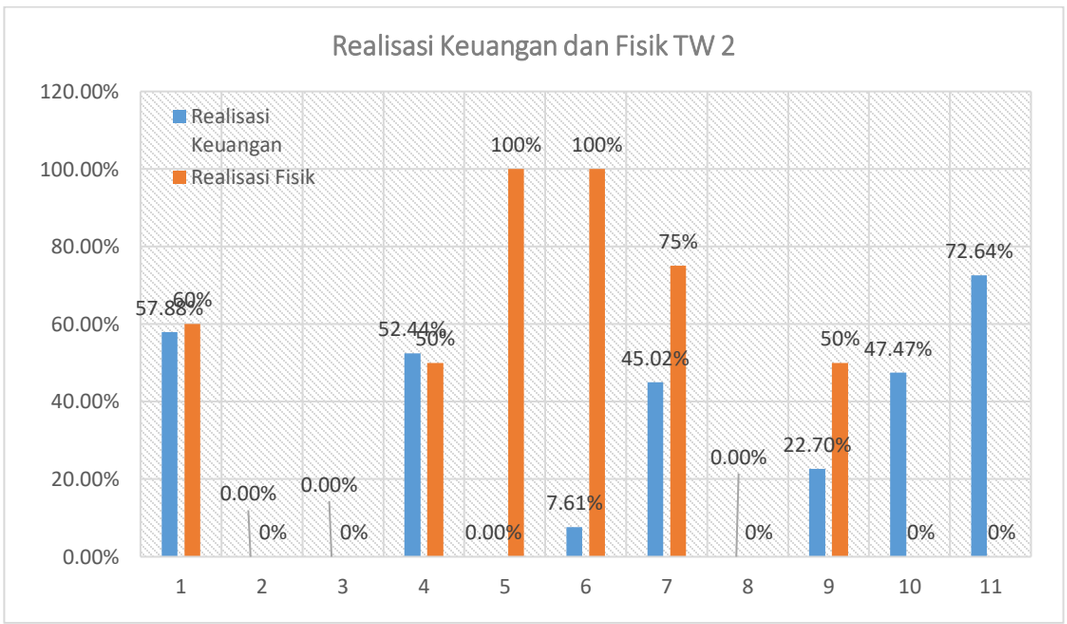

Gambar 1 Grafik Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran TW-n

Sumber : Emonev Tahun 2021/Triwulan ke-2

1 :	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7 :	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
2 :	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	8 :	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

3 :	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	9 :	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 :	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	10 :	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
5 :	Program Pengembangan UMKM	11 :	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Kabupaten/Kota
6 :	Program Pengembangan Ekspor		

Dari Grafik 2.1 dapat kita ketahui bahwa dari 11 Program yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, ada terdapat 4 Program yang belum dapat terealisasikan dan mempunyai serapan anggaran nol. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 yang mengakibatkan wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalami PPKM darurat, sehingga tidak dimungkinkan menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Program yang dimaksud adalah :

a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
c. Program Pengembangan UMKM
d. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program yang tidak terserap anggarannya, dikarenakan :

1. Untuk Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, anggarannya belum terserap karena belum ada badan hukum yang terbentuk, dimana saat ini berkas pengajuan Akta Pendirian Koperasi masih di proses oleh Notaris;
2. Target SPS di TW 4 pada bulan Desember sebanyak 37 Koperasi.

   Penyuluhan pendirian koperasi & pendampingan pemberkasan terkendala PPKM/PSBB pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan tidak di triwulan 2 dan juga dikarenakan belum terbitnya SPD sehingga banyak kegiatan / sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan;

3. Untuk Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Capaian Kinerja Program masih 0%, hal ini dikarenakan ketidaktersediaan anggaran sesuai target, sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan / sub kegiatan jadi terhambat;
4. Untuk Program Pengembangan UMKM dilakukan secara daring dengan melibatkan kolaborator sebagai penyelenggara, sehingga capaian kinerjanya 100%, akan tetapi belum ada serapan anggaran;
5. Untuk Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Dikarenakan masa pandemi tidak memungkinkan untuk kegiatan Pameran dan jadwal pelaksanaan pun sudah lewat, SPD juga tidak terbit, dari 5 (lima) kegiatan pameran dalam kota yang direncanakan, kemungkinan hanya 1 (satu) kegiatan yang diundur pelaksanaannya dibulan oktober yaitu Pameran Inacraf. Jika memungkinkan akan melaksanakan 1 Event Pameran saja Di TW 4.

Tabel 3. Data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada Dinas PPKUKM

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan	Realisasi Anggaran di TW 2 (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Poin	N/A	-	-	324.800.000	188.000.000	57,88%	SPD 193.000.000,Target Program 4 Poin di TW 4
A.2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang keanggotaan di DKI Jakarta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	N/A	N/A	-	-	1.581.016.051	0	0	Target Program di Tw 4 (DAK)
A.2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	37	N/A	-	-	149.760.000	0	-	1. Anggaran belum terserap karena belum ada badan hukum yang jadi dimana saat ini berkas pengajuan Akta Pendirian Koperasi masih di proses oleh Notaris; 2. Target SPS di TW 4 pada bulan Desember sebanyak 37 Koperasi 3. Penyuluhan pendirian koperasi & pendampingan pemberkasan terkendala PPKM/PSBB

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan	Realisasi Anggaran di TW 2 (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1. 27799 UKM 2. Jumlah Laporan PJLP Pendamping 3. Pelayanan TKK dan JCH (4 Poin) 4. Lokasi Loksem yang direhab	100%	100%	Mencapai Target	20.455.432.978	10.172.854.866	49,73%	1. Kegiatan Pemberdayaan UMKM dilakukan secara online dengan Kolaborasi berbagai pihak dikarenakan masa PPKM darurat 2. Jumlah Laporan PJLP Pendamping UMKM sudah terlaksana 50% sampai TW 2, target 100% ada di TW 4 3. Target 4 Poin ada di TW 4 4. Rehab menunggu tender
A.2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM peserta kegiatan pendidikan dan pelatihan serta Bimbingan teknis	60	60	100%	Mencapai target	395.712.000	1.625.000	0,47%	Target Program di Tw 4
A.3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	1000	1000	100%	Mencapai target	4.376.036.048	333.164.720	7,61%	Faktor Penghambat: Pelaksanaan Bazar tidak dapat dilaksanakan secara offline akibat kebijakan Pembatasan PPKM yang menyebabkan tidak bisa berkumpul

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan	Realisasi Anggaran di TW 2 (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										Faktor Pendorong 1. SPD sudah terbit karena kegiatan ini didanai oleh Dana Instensif Daerah (DID) 2. Target yang tercapai pada penyelenggaraan Bazar UKM akibat pelaksanaan bazar yang dilakukan secara kolaborasi dan online
A.3.30.06 B.3.30.06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Kode A : 1. Persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti 2. Persentase Cakupan alat UTTP (Ukuran, Takaran, Timbangan, dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang 3. rologian yang diawasi	100%	75%	75%	sedang	5.175.836.010	2.329.949.421	45,02%	Target Kinerja Ada di TW 4 Penyerapan rendah karena : - Hibah BPSK masih sedikit yang turun SPDnya - penyerapan terlaksana dengan baik karena faktor pendukung perencanaan yang baik, serta didukung kerjasama tim pelaksana yang baik. - Harga di komponen lebih tinggi dari harga pasaran - Penyedia tidak dikenakan PPN karena Non PKP

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan	Realisasi Anggaran di TW 2 (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
										- Sebagian besar pelaku usaha menggratiskan biaya pengiriman pengujian SNI genteng, keramik, kloset duduk - Tes Kit Belum sudah Selesai lelang tapi belum dibayarkan
A.3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri	N/A	N/A	-	Sangat Rendah	2.790.705070	0	-	Dikarenakan masa pandemi tidak memungkinkan untuk kegiatan Pameran dan jadwal pelaksanaan pun sudah lewat, SPD juga tidak terbit, dari 5 (lima) kegiatan pameran dalam kota yang direncanakan, kemungkinan hanya 1 (satu)kegiatan yang diundur pelaksanaanya dibulan oktober yaitu Pameran Inacraf. Jika memungkinkan akan melaksanakan 1 Event Pameran saja Di TW 4.
A.3.31.02	Program Perencanaan dan	1. Jumlah wirausaha industri baru	10.000 Wirausaha	50%	50%	Sangat Rendah	26.120.593.784	5.929.079.140	22,70%	Faktor Penghambat

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan	Realisasi Anggaran di TW 2 (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pembangunan Industri	2. Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif 3. Persentase jumlah IKM yang berkualitas 4. Jumlah Laporan PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM	100% 100% 1104							1. Pelaksanaan Pembinaan Kewirausahaan UKM belum terbit SPD (SPD yang baru terbit Hanya Makan Minum Kegiatan Pelatihan Pembinaan) 2. Pelaksanaan Pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara offline akibat kebijakan Pembatasan PPKM yang menyebabkan tidak bisa berkumpul Faktor Pendorong 1. Target yang tercapai pada pelatihan penumbuhan wirausahaa industri akibat pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara online dan berkolaborasi dengan kolaborator
A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1. indeks kepuasan pelayanan kantor	4 Poin	N/A	-	-	178.173.947.071	83.671.632.577	46,96%	Target Program di Tw 4

Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program				Kinerja Keuangan			Keterangan
			Target Kinerja	Realisasi TW 2	Capaian Kinerja Program	Interpretasi	Target Keuangan	Realisasi Anggaran di TW 2 (Rp)	Persentase Realisasi/ Serapan Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional								
B.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi-Kabupaten/Kota	1. indeks kepuasan pelayanan kantor 2. indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Poin	N/A	-	-	6.341.870.642	4.606.574.161	72,64%	Target Program di Tw 4

Dari tabel 3 Data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada Dinas PPKUKM dapat kita ketahui bahwa dari 11 Program yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 (dua) Program yang mendapatkan interpretasi kategori **Sangat Rendah**. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 yang mengakibatkan wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalami PPKM darurat, sehingga tidak dimungkinkan menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Program yang dimaksud adalah :

1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Untuk program yang masuk interpretasi kategori Sangat Rendah yaitu Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri analisanya adalah, dikarenakan masa pandemi tidak memungkinkan untuk kegiatan Pameran dan jadwal pelaksanaan pun sudah lewat, SPD juga tidak terbit, dan dari 5 (lima) kegiatan pameran dalam kota yang direncanakan, kemungkinan hanya 1 (satu) kegiatan yang diundur pelaksanaannya dibulan oktober yaitu Pameran Inacraf. Jika memungkinkan akan melaksanakan 1 Event Pameran saja pada Triwulan ke 4 (empat).

Untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri , analisanya adalah Pelaksanaan Pembinaan Kewirausahaan UKM terkendala di SPD (SPD yang baru terbit Hanya Makan Minum Kegiatan Pelatihan Pembinaan), Pelaksanaan Pelatihan tidak dapat dilaksanakan secara offline akibat kebijakan Pembatasan PPKM yang menyebabkan tidak bisa berkumpul.

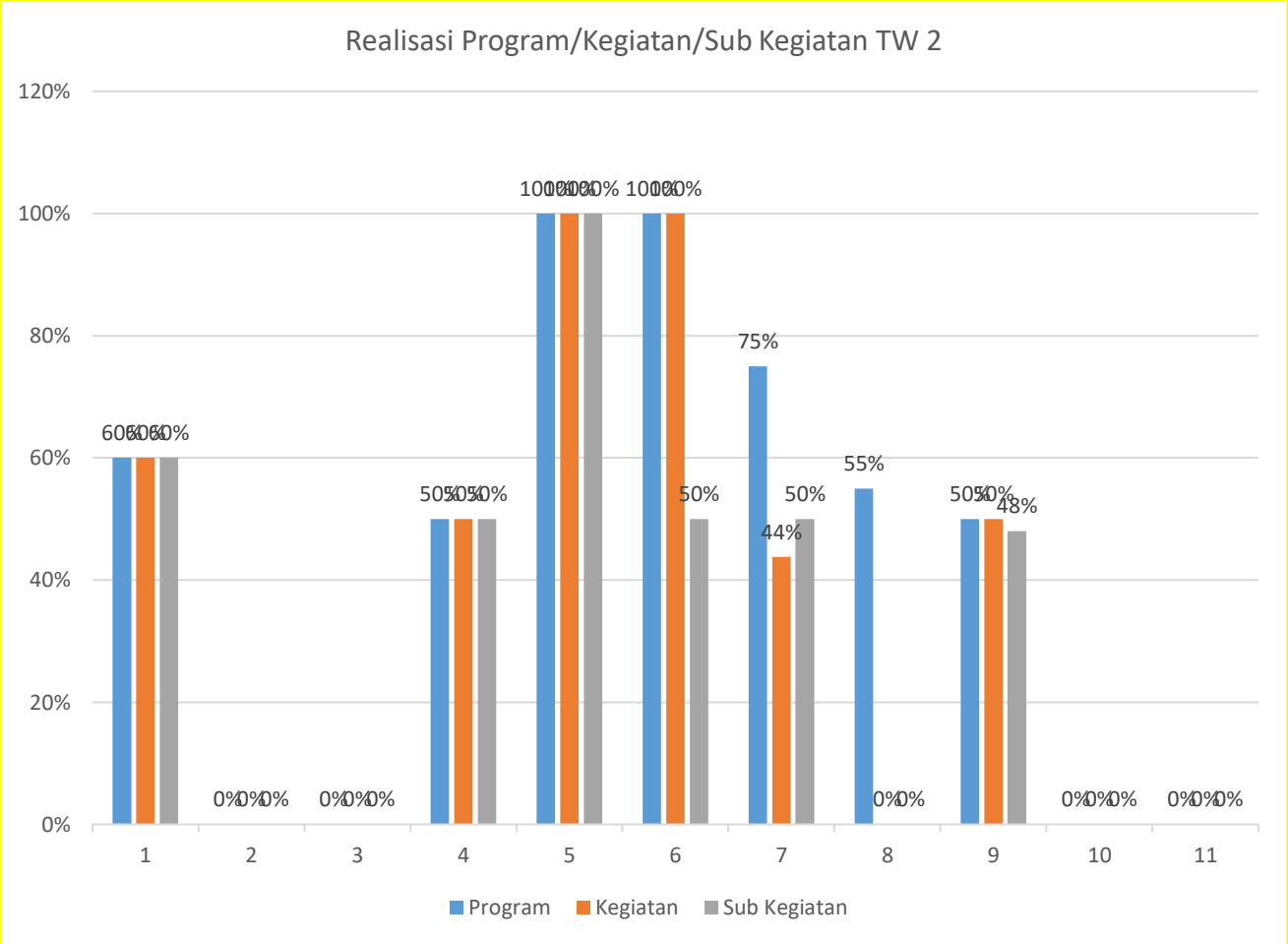

Gambar 2 : Grafik Capaian Kinerja Program, Capaian Kinerja Kegiatan dan Capaian Kinerja Subkegiatan

1 :	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7 :	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
2 :	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	8 :	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3 :	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	9 :	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4 :	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	10 :	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

5 : Program Pengembangan UMKM

6 : Program Pengembangan Ekspor

11 : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi - Kabupaten/Kota

Tabel 4. Data Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Triwulan II Tahun 2021

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rata-rata Capaian
1	2	3
A.2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	60%
A.2.16.03.1.02	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	60%
A.2.16.03.1.02.08	*Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*	60%
A.2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	0%
A.2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0%
A.2.17.05.1.01.01	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	0%
A.2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	0%
A.2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0%
A.2.17.06.1.01.02	*Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha*	0%

A.2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	50%	
A.2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	50%	
A.2.17.07.1.01.01	*Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan*	50%	
A.2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	100%	
A.2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	100%	
A.2.17.08.1.01.01	*Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi*	100%	
A.3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	100%	
A.3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	100%	
A.3.30.05.1.01.01	*Pameran Dagang Internasional/Nasional*	0%	
A.3.30.05.1.01.02	*Pameran Dagang Lokal*	100%	
A.3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	75%	
A.3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	75%	
A.3.30.06.1.02.01	*Verifikasi Mutu Produk*	75%	
A.3.30.06.1.02.02	*Pengembangan Layanan Pengujian*	75%	

A.3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	0%	
A.3.30.06.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	0%	
A.3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	50%	
A.3.30.06.1.02.01	*Verifikasi Mutu Produk*	50%	
B.3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	50%	
B.3.30.06.2.01.02	*Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal*	50%	
A.3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	55%	
A.3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	0%	
A.3.30.07.1.01.01	*Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi*	0%	
A.3.30.07.1.02.01	*Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi*	0%	
A.3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	50%	
A.3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	50%	
A.3.31.02.1.01.03	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	49%	
A.3.31.02.1.01.04	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri*	48%	
A.3.31.02.1.01.05	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	47%	
A.X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	0%	
A.X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0%	
A.X.XX.01.1.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	0%	

A.X.XX.01.1.02.03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	0%	
A.X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0%	
A.X.XX.01.1.03.02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	0%	
A.X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0%	
A.X.XX.01.1.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0%	
A.X.XX.01.1.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	0%	
A.X.XX.01.1.06.07	*Penyediaan Bahan/Material*	0%	
A.X.XX.01.1.06.08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	0%	
A.X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	
A.X.XX.01.1.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0%	
A.X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	
A.X.XX.01.1.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	0%	
A.X.XX.01.1.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0%	
A.X.XX.01.1.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	0%	
A.X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	
A.X.XX.01.1.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	0%	
A.X.XX.01.1.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	0%	
A.X.XX.01.1.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0%	
A.X.XX.01.1.09.11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0%	

B.X.XX.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	0%	
B.X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0%	
B.X.XX.01.2.02.03	*Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD*	0%	
B.X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0%	
B.X.XX.01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0%	
B.X.XX.01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	0%	
B.X.XX.01.2.06.07	*Penyediaan Bahan/Material*	0%	
B.X.XX.01.2.06.08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	0%	
B.X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	
B.X.XX.01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	0%	
B.X.XX.01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	0%	
B.X.XX.01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	0%	
B.X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0%	
B.X.XX.01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	0%	
B.X.XX.01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0%	

Dari tabel 4 Data Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Triwulan II Tahun 2021 pada Dinas PPKUKM dapat kita ketahui bahwa dari 11 Program yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan, dan 5 (lima) Sub Kegiatan yang mendapatkan interpretasi kategori **Sangat Rendah**, Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 yang mengakibatkan wilayah Provinsi DKI Jakarta mengalami PPKM darurat, sehingga tidak dimungkinkan menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Program yang dimaksud adalah :

1. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;

2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kemudian terdapat 2 (dua) kegiatan yang masuk ke dalam interpretasi kategori Sangat Rendah dalam realisasi kinerja di Triwulan ke II tahun anggaran 2021. Kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri;
2. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi

Ada terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan yang masuk ke dalam interpretasi kategori sangat rendah dalam realisasi kinerja di triwulan ke II tahun anggaran 2021. Sub Kegiatan yang dimaksud adalah :

1. Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi;
2. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

Pada Sub kegiatan di atas mempunyai realisasi kinerja yang sangat rendah jika dibandingkan dengan target utama. Namun Sub Kegiatan tersebut mempunyai realisasi kinerja yang mencapai target jika dibandingkan dengan target kinerja di triwulan ke II

Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih terdapat Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendapatkan realisasi kinerja sebesar 0 (nol) persen, namun hal tersebut dikarenakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dimaksud mempunyai target kinerja di Triwulan ke IV, sehingga tidak bisa dilakukan penilaian di Triwulan ke II.

2.3 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat

Dalam pencapaian target kinerja ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang mempengaruhi pencapaian target tersebut, diantaranya adalah :

Faktor Pendorong :

1. Faktor pendukung perencanaan yang baik, serta didukung kerjasama tim pelaksana yang baik;
2. Adanya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan / Sub Kegiatan;
3. Bebarapa Kegiatan dan Sub Kegiatan target kinernyanya ada di Triwulan ke 4 (empat).

Faktor Penghambat :

1. Anggaran belum terserap karena belum ada badan hukum yang jadi dimana saat ini berkas pengajuan Akta Pendirian Koperasi masih di proses oleh Notaris;
2. Penyuluhan pendirian koperasi & pendampingan pemberkasan terkendala PPKM darurat;
3. Kegiatan Pemberdayaan UMKM tidak dapat dilakukan secara tatap muka, sehingga dilakukan secara online dengan Kolaborasi berbagai pihak dikarenakan masa PPKM darurat;
4. Pelaksanaan Bazaar tidak dapat dilaksanakan secara offline akibat kebijakan Pembatasan PPKM yang menyebabkan tidak bisa berkumpul;
5. Tidak tersedianya anggaran, dikarenakan Surat Penyediaan Dana (SPD) belum terbit;

2.4 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Indikator Kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur

kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan pada urusan Perindustrian, Perdagangan serta Koperasi dan UKM digunakan Indikator Kinerja Kunci meliputi Aspek Tingkat Capaian Kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dimana Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

a) Kedudukan

(1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

b) Tugas Pokok

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

c) Fungsi

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Provinsi DKI Jakarta;
2. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;

3. Perumusan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
4. Pelaksanaan kebijakan, bisnis proses, standar dan prosedur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
5. Pelaksanaan penataan, pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan, perdagangan dan kewirausahaan;
6. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
7. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
8. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi dan sarana distribusi perdagangan;
9. Pelaksanaan penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. Pelaksanaan pemantauan harga dan informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
11. Pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok;
12. Pelaksanaan promosi perdagangan dan pencitraan produk ekspor;
13. Pelaksanaan fasilitasi ekspor impor;
14. Pelaksanaan penerbitan surat keterangan asal;
15. Pelaksanaan perlindungan konsumen;
16. Pelaksanaan pengujian mutu barang;
17. Pelaksanaan pelatihan perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Pelaksanaan kemetrologian berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
19. Pelaksanaan pemeriksaan, pengawasan clan penilaian kesehatan koperasi;
20. Pengawasan dan pengendalian perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Pemberian rekomendasi perizinan/nonperizinan bidang perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

22. Pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
23. Pelaksanaan pendampingan perlindungan hak kekayaan intelektual;
24. Pelaksanaan pendampingan sertifikasi produk-produk industri;
25. Pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
26. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
27. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
28. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

d) Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Kepegawaian;
    3. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
    4. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
    1. Seksi Pengembangan Industri;
    2. Seksi Industri Kecil dan Menengah; dan
    3. Seksi Industri Kreatif dan Digital.
d. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
    1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
    3. Seksi Pemasaran.

e. Bidang Koperasi, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
    2. Seksi Kelembagaan Koperasi; dan
    3. Seksi Pembiayaan Koperasi.

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
   1. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
   2. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Kecil dan Menengah; dan
   3. Seksi Usaha Informal.

g. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
   1. Seksi Pengawasan Perindustrian dan Kemetrologian;
   2. Seksi Pengawasan Perdagangan; dan
   3. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

h. Suku Dinas Kota;

i. Unit Pelaksana Teknis; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

e) Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas PPKUKM wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPKUKM.
3. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Satuan Pelaksana PPKUKM Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Dinas PPKUKM dalam melaksanakan tugasnya dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Satuan Pelaksana PPKUKM Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas PPKUKM memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan

bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

5. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Satuan Pelaksana PPKUKM Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas PPKUKM mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Satuan Pelaksana PPKUKM Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Dinas PPKUKM mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-rnasing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
7. Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Satuan Pelaksana PPKUKM Kecamatan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas PPKUKM menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud, menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-rnasing

2.5 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dibentuk dengan mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Sektor yang ada dalam Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari bidang-bidang, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Suku Dinas. Kombinasi itu membutuhkan koordinasi yang kuat dan saling bersinergi untuk meningkatkan kinerja agar pelayanan menjadi optimal.

Disamping itu dampak atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai implementasi otonomi daerah, berakibat peralihan tugas dari semula ditangani oleh pemerintah pusat melalui jalur kementerian menjadi ditangani oleh pemerintah daerah.

Permasalahan baik faktor internal maupun eksternal adalah rujukan untuk menetapkan kebijakan dan program periode 2017-2022. Permasalahan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi dua besar :

1. Permasalahan terkait organisasi dan sumber daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
2. Isu terkait berdasarkan urusan.

Secara ringkas, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta seperti yang terlihat pada tabel 2.3.1 berikut.

Tabel 5. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

Masalah Pokok (Aspek Kajian)	Capaian/Kondisi Saat ini	Mas		Akar Masalah
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR	
(	(	(	(	(
Permasalahan terkait jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah tenaga teknis yang kurang memadai	Anggaran untuk pelatihan	Perekrutan tenaga teknis PNS dan non PNS	Belum optimalnya Pelayanan yang diberikan
Permasalahan terkait Urusan Koperasi dan UKM	Jumlah koperasi aktif di Provinsi DKI Jakarta 76,38 %, dan jumlah UKM 99,16 % Jumlah Lokasi Binaan hanya 19 Lokasi, dan Lokasi sementara 233 lokasi	Membangun kemitraan dan jaringan usaha antar Koperasi, UKM dan Badan Usaha melalui Sistem Informasi Kewirausahan Terpadu Peluasan akses pasar melalui revitasisi Lokasi Binaan dan Lokasi Sementara	Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset. Serta minimnya akses pasar bagi produk-produk yang diproduksi oleh Koperasi,	Belum optimalnya Sistem Informasi terkait pemutakhiran data Koperasi dan UKM Belum optimalnya daya tampung dan daya dukung pelayanan di Lokasi
Permasalahan terkait Urusan Perdagangan	Jumlah Expor Non Migas melalui DKI Jakarta 51,397.26 Juta USD	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perdagangan	Keluhan pelaku usaha khususnya bidang ekspor impor tentang akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu penyebab biaya	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana serta SDM dalam Penerbitan SKA.

Sebagai bagian dari entitas global dan nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi nafas dari seluruh rangkaian proses pembangunan di wilayahnya. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan keselarasan antara cakupan dan substansi TPB/SDGs dan Panca Upaya Utama Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memegang peran yang strategis untuk mendukung pencapaian TPB/SDGs melalui program dan kegiatan yang terkait ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

Pada aspek implementasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 2 Tujuan dari 17 Tujuan yang terdapat pada TPB/SDGs. Tujuan-tujuan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta tersebut yakni:

1. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang;
2. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, mempunyai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di DKI Jakarta. Hal ini didasarkan pada program pelayanan, program tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan pada periode lima tahun mendatang. Program tersebut di bagi menjadi tiga urusan, yakni urusan Perindustrian, Perdagangan serta urusan Koperasi UKM.

Kekuatan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan :

1 Ketersediaan dari peraturan perundangan yang memadai dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri, peraturan gubernur yang mendukung pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
2 Sistem pelayanan pemerintahan dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan DKI Jakarta yang menjamin pelayanan maksimal bagi seluruh pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.
3 Tersedianya Fasilitasi dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi UKM dengan menyediakan Sarana Prasarana Promosi dan Perdagangan, Penyelenggaraan pameran promosi dan partisipasi pameran.
4 Tersedianya Fasilitasi akses permodalan UKM melalui Pengembangan Kemitraan dengan BUMN/BUMD, Perbankan, Lembaga Keuangan Non-Bank serta Sosialisasi Program Pembiayaan Kredit oleh Pemerintah Pusat (KUR, LPDB, Kredit Program Lainnya).
5 Sesuai Keppres Nomor : 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan SKA Serta Peraturan Menteri Perdagangan No.60/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Instansi penerbit SKA untuk Barang Ekspor Indonesia melalui Direktur Jenderal Perdagangan luar negeri atas Nama menteri Perdagangan RI menunjuk Kepala Dinas KUKMP Provinsi DKI Jakarta sebagai pejabat yang bewenang penerbitkan SKA di Provinsi DKI Jakarta.

Kelemahan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan :

1 Terbatasnya Sarana Prasarana yang dimiliki UKM dalam mempromosikan dan memasarkan produknya. Disamping itu, pemasaran masih terfokus pada internal Koperasi.
2 Sumber daya manusia yang terbatas yang memiliki keahlian dalam pengelolaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan sesuai perkembangan dunia ekonomi dan perkembangan teknologi.

3 Belum maksimalnya pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang berdampak pada keberlangsungan kelembagaannya.

4 Dalam partisipasi pameran promosi luar negeri, seringkali terkendala oleh lamanya pengurusan pengajuan surat izin perjalanan dinas baik pengurusan izin ke sekda, paspor biru, dan sebagainya. Untuk itu dilakukan percepatan pengurusan izin perjalanan dinas untuk pameran di luar negeri.

5 Sarana prasarana yang terbatas di setiap wilayah Jakarta yang mampu menunjang pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

6 Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta SDM dalam Penerbitan SKA.

Tantangan Pengembangan Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan :

1 Belum terstandarnya kelembagaan, skala usaha, dan permodalan yang menjamin keberlangsungan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan.

2 Perbedaan persepsi dikalangan masyarakat akan nilai penting Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang dapat menopang perekonomian Jakarta dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3 Belum terbentuk jaringan antar Koperasi, yang berdampak pada relatif rendahnya daya saing. Untuk itu dilakukan peningkatan kemitraan dan jaringan usaha antar Koperasi, UKM dan Badan Usaha Lainnya.

4 Partisipasi pelaku usaha (UKM) dalam mengikuti partisipasi di dalam & luar negeri sangat kurang. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan kemampuan keuangan UKM.

5 Adanya keluhan dari masyarakat pelaku usaha khususnya bidang ekspor impor tentang akses Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan salah satu penyebab biaya tinggi.

6 Keterbatasan akses permodalan yang dimiliki karena terbentur jenis usaha, skala usaha, persyaratan permodalan dan kepemilikan aset. Serta minimnya akses pasar bagi produk-produk yang diproduksi oleh Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

7 Segmentasi pasar yang semakin jelas mendorong para pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah lebih berinovasi dan berkreasi agar produknya laku di pasaran.

8 Meningkatnya daya saing produk produk hasil usaha pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mengedepankan prinsip efesien, efektif, ramah lingkungan dan partisipatif.

9 Penggunaan desain dan teknologi dalam pengembangan produk yang harus diimbangi oleh para pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan agar lebih maju.

10 Kondisi ekonomi yang masih terkena dampak akibat pandemic covid-19.

2.6 Isu-Isu Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang Direncanakan

A. Kelembagaan Koperasi dan UKM :

1. Pendidikan dan pelatihan kegiatan manajemen koperasi dan UKM yang professional dan berorientasi pasar.
2. Pembuatan dan penerapan standardisasi pengelolaan koperasi dan
3. UKM berdasarkan peraturan yang berlaku.
4. Pemberian dan peningkatan kewenangan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kelembagaan Koperasi dan UKM.
5. Perlunya peningkatan fasilitas dan ketersediaan sumber daya kelembagaan yang mendukung pada pengembangan jaringan koperasi dan UKM untuk membuka akses pasar seluas-luasnya.
6. Perlunya stimulan pengembangan kelembagaan untuk mengembangkan produk yang berdaya saing dan bervisi teknologi bagi koperasi dan UKM.
7. Kurangnya upaya program penyelarasan kemitraan antara koperasi dan UKM dengan pengusaha besar.
8. Revitalisasi kelembagaan koperasi agar mampu melaksanakan syarat minimal yaitu Rapat Anggota Tahunan (RAT).
9. Kategorisasi UKM dari sisi jenis usaha dan periode kegiatan usaha.

B. Proses Bisnis :

1. Revitalisasi bisnis koperasi yang bisa mendukung operasional koperasi.
2. Penetapan Road Map jenis usaha, skala usaha dan sumber daya usaha untuk menjamin keberlangsungan proses bisnis Koperasi dan UKM.
3. Perlunya revitalisasi kebijakan yang berpihak pada koperasi dan UKM sehingga mempengaruhi peningkatan usahanya.
4. Standardisasi produk-produk hasil produksi dan usaha koperasi dan
5. UKM yang memenuhi persyaratan pasar dan berdaya saing tinggi.
6. Jaminan ketersediaan sumber daya usaha yang tidak dipengaruhi faktor eksternal seperti cuaca, bencana dan dampak perekonomian.
7. Kegiatan usaha Koperasi dan UKM masih tergantung dari periode atau jadwal usaha seperti harian, mingguan, dan bulanan.

C. Pengembangan SDM :

1. Terbatasnya program peningkatan profesionalisme SDM yang berorientasi pengembangan jiwa kewirausahaan, keterampilan manajemen usaha melalui Diklat, Bintek dan Sosialisasi.
2. Minimnya SDM yang berminat dalam mengembangkan koperasi dan UKM secara profesional dan berorientasi pasar yang memiliki standar daya saing tinggi.
3. Sektor koperasi dan UKM belum menjadi pilihan utama SDM yang produktif.
4. Terkandalanya budget/anggaran guna menunjang penerapan teknologi informasi tepat guna bagi koperasi dan UMKM.

D. Peningkatan Permodalan :

1. Kebijakan akses permodalan yang belum memadai guna sinkronisasi pembiayaan bagi permodalan koperasi dan UKM.
2. Peraturan pembiayaan untuk kegiatan Koperasi dan UKM yang masih menggunakan standar pembiayaan umum.
3. Belum optimalnya lembaga pembiayaan dalam menyalurkan permodalan untuk usaha Koperasi dan UMKM.
4. Revitalisasi kebijakan untuk mempermudah koperasi dan UKM agar bankable.

E. Fasilitasi Sarana dan Prasarana :

1. Perkembangan standardisasi sarana prasana koperasi dan UKM berdampak pada perlunya penyesuaian ketersediaan sarana prasarana yang dapat mengembangkan usaha dan produk hasil produksi koperasi dan UMKM.
2. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait sehingga menyebabkan kurangnya ketersediaan pasokan lokasi, daya tampung dan daya dukung bagi lokasi untuk PKL UMKM yang ada saat ini.
3. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kualitas SDM pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan DKI Jakarta.
4. Kemajuan teknologi berdampak pada keharusan untuk melakukan revitalisasi sarana prasarana koperasi dan UKM.

F. Perijinan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah :

1. Kewenangan perijinan belum sepenuhnya dikelola pemerintah provinsi namun masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Sarana prasarana perijinan yang berbasis online masih terbatas dan masih memerlukan penyesuaian dengan perkembangan usaha koperasi, usaha kecil dan menengah serta perdagangan.
3. Belum tersedianya sumber daya manusia yang cukup dalam menangani perijinan yang terpadu.
4. Perlunya revitalisasi kebijakan perijinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mempermudah pendirian usaha di wilayahnya.

G. Pemasaran :

1. Perlunya revitalisasi konsep pemasaran yang mensinergikan dengan perkembangan pasar dan konsumen khususnya pemasaran yang menjual produk-produk yang berhubungan dengan lifestyle.
2. Belum optimalnya kegiatan-kegiatan pemasaran yang berbasis produk sehingga perlu diarahkan pemasaran yang berbasis wilayah dan ruang strategis.

3. Revitalisasi ruang-ruang usaha dalam bentuk lokasi binaan (Lokbin), lokasi sementara (Loksem) dan lokasi terpadu sesuai perkembangan pasar, daya dukung wilayah dan karakteristik konsumen.
4. Perlunya terobosan inovasi dalam melakukan revitalisasi usaha agar bisa memproduksi sekaligus memasarkan produk yang dihasilkan.
5. Belum tersedianya Road Map yang komprehensif pemasaran produk- produk hasil produksi koperasi dan UKM.

H. Pengembangan Perdagangan Luar Negeri :

1. Kurangnya kompetensi SDM Perdagangan yang responsif dan proaktif terhadap potensi pengembangan pemasaran berbagai komoditas potensial yang tumbuh di masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan pengelolaan informasi pasar, misalnya penggunaan akses teknologi informasi yang lebih transparan dan mudah diakses, yang dapat mendorong terjalinnya perdagangan ekspor-impor.
3. Kurangnya kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan program-program Perdagangan yang dapat mengantisipasi potensi perkembangan perdagangan di masa depan.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat bisnis dan komunitas professional untuk berkoordinasi dan bersinergi dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan Perdagangan.
5. Peningkatan total nilai volume golongan komoditas yang diimpor dari luar negeri.
6. Serbuan produk impor yang didatangkan oleh para pengusaha ritel besar dan memberi label sendiri.
7. Lemahnya pengawasan terhadap kualitas dan beredarnya produk illegal yang diperdagangkan.

I. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri :

1. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam distribusi penjualan barang dan jasa serta banyaknya perusahaan yang tidak mengurus perijinan untuk melakukan usaha.

2. Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha perdagangan agar memenuhi persyaratan formal.
3. Perlunya peningkatan kesadaran para pelaku usaha untuk memiliki legalitas kelembagaan usaha.
4. Kurang optimalnya kebijakan yang dapat mendorong pengembangan Pasar Tradisional dan jasa retail kategori UKM.
5. Perlunya pengaturan khusus antara usaha Koperasi dan UKM dengan usaha ritel yang besar maupun dalam bentuk minimarket.
6. Belum optimalnya pembangunan kemitraan antara pelaku UKM dengan pelaku jasa ritel modern.

J. Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan :

1. Terjadinya pelanggaran peraturan Perdagangan, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek yang mengatur perijinan sektor Perdagangan.
2. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap standardisasi dari produk produk yang dihasilkan koperasi dan UKM.
3. Perlunya optimalisasi distribusi barang pokok untuk penyebaran kebutuhan masyarakat.
4. Lemahnya kompetensi dan profesionalisme para petugas yang diharapkan dapat melaksanakan pengawasan dan perdagangan di lapangan dengan efektif dan efisien.
5. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme para petugas untuk memahami aturan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perdagangan di lapangan. Sebagai ilustrasi, dalam rangka pengawasan, telah disusun petunjuk teknis tata cara pengawasan untuk komoditii (SNI wajib), yaitu: pupuk (15 jenis), lampu swaballast, tepung terigu, dan ban (5 jenis).
6. Masih adanya petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian perdagangan yang masih belum dibuat. Misalnya, untuk alat elektronik (4 jenis) masih dalam proses penyusunan.
7. Perlunya penegakkan hukum dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan.

K. Sarana dan Prasarana :

1. Kurangnya fasilitas yang dapat mendukung proses pengawasan dan pengendalian perdagangan, untuk melaksanakan pengawasan barang beredar
2. Perlu ditingkatkannya sarana, prasarana, dan kemampuan SDM yang dimiliki; sehingga upaya perlindungan konsumen dapat lebih diefektifkan melalui pengembangan kemetrologian alat ukur yang sesuai standar.

a. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dimulai dengan mengumpulkan informasi dan data dari Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagai bahan Penyusunan Rancangan Renja Tahun Anggaran 2022. Setelah melalui beberapa tahap pembahasan dan review mengenai analisis kebutuhan, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan. Penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan tersebut tetap memperhatikan skala prioritas dan target yang ingin dicapai. Hasil analisa kebutuhan diuraikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Secara garis besar tahapan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat pada penyusunan Dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rembuk RW

   Rembuk RW dilakukan untuk menjaring aspirasi masyarakat berdasarkan standardisasi usulan kegiatan rembuk RW pada 2.731 RW yang ada di Provinsi DKI Jakarta;
2. Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan

   Dokumen tersebut memuat hasil rembuk RW, arah kebijakan pembangunan Kelurahan/Kecamatan, dan program dan prioritas Kelurahan/Kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan, sebagaimana diamantkan pada Pasal 53 dan

55 Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

3. Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan

   Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 267 Kelurahan dan 44 Kecamatan yang akan dilaksanakan Tahun 2021, disertai dengan proses validasi secara berjenjang terhadap seluruh hasil usulan kegiatan hasil Rembuk RW;

4. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

   Digunakan sebagai acuan dasar dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD/UKPD;

5. Pelaksanaan Musrenbang Kota/Kabupaten dan Forum UKPD

   Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan prioritas rencana kegiatan pembangunan pada 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021. Selain itu dilakukan validasi usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang akan diserap melalui UKPD Kota/Kabupaten, pembahasan awal Renja UKPD melalui rangkaian Forum UKPD yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pembahasan pada forum SKPD. Selain itu, forum UKPD juga dilakukan untuk membahas Usulan Langsung Masyarakat dan Hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan;

6. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD dan Forum SKPD

   Dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan bagi rancangan RKPD. Pada Forum SKPD juga dibahas usulan langsung masyarakat dan hasil Reses DPRD yang telah diparipurnakan;

7. Perumusan dan Penetapan RKPD

   Perumusan dan Penetapan RKPD 2021 dilakukan melalui proses yang komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

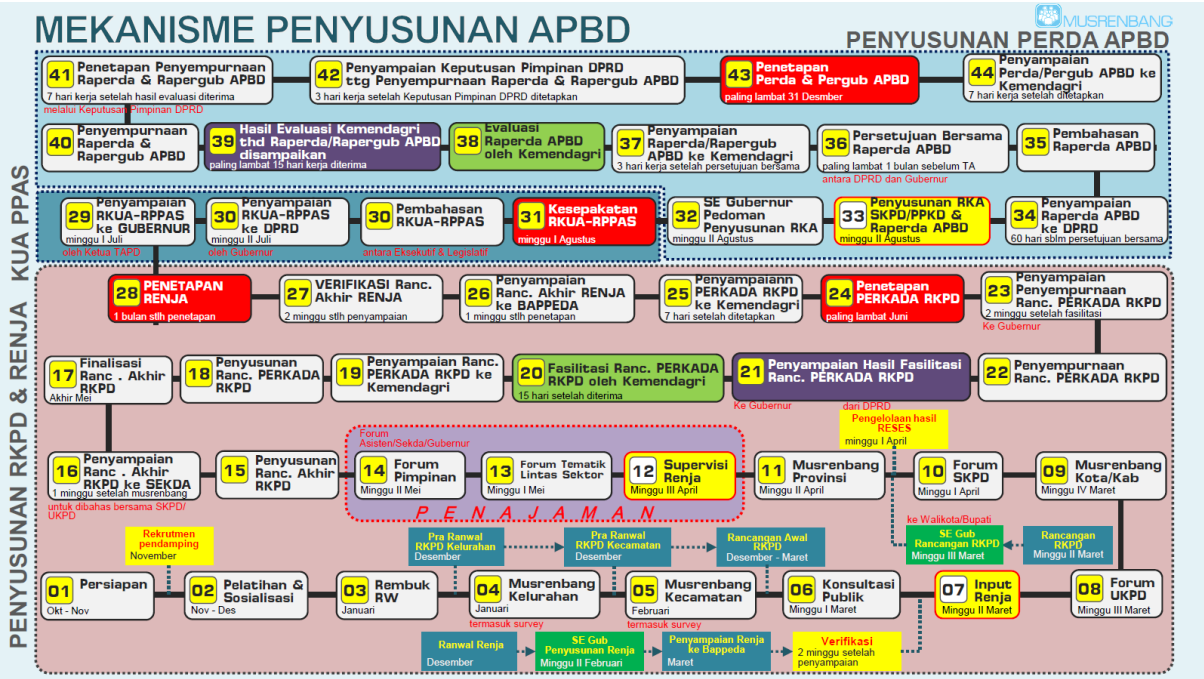

Gambar 3. Mekanisme Penyusunan APBD

Masukan usulan kegiatan hasil Rembuk RW yang telah divalidasi secara berjenjang menghasilkan usulan masyarakat yang dapat diakomodir menjadi kegiatan di dalam Rencana Kerja SKPD/UKPD pada RKPD 2022. Secara umum, total aspirasi masyarakat melalui mekanisme Rembuk RW. Dalam pelaksanaannya, aspirasi masyarakat melalui mekanisme Rembuk RW dalam bentuk usulan Rembuk RW telah melalui proses verifikasi dan validasi secara berjenjang melalui fase Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota / Kabupaten, ditambah lagi dengan adanya forum-forum pembahasan untuk penajaman Renja SKPD/UKPD. Selain itu juga melakukan penjaringan aspirasi masyarakat secara langsung melalui kanal usulan langsung pada sistem e-Musrenbang.

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3

BAB III

RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berikut adalah Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari usulan rencana akhir perubahan rencana kerja di Bidang/Sudin dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021;

Tabel Isian Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021

Perangkat Daerah/Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		RSK
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				324,800,000				324,800,000	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	16	03	1.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				324,800,000				324,800,000	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	16	03	1.02	08	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap pengelolaan sistem informasi Dinas	DKI Jakarta	4 Poin	324,800,000	APBD		4 Poin	324,800,000	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi yang bersertifikat Nomor Induk Koperasi	DKI Jakarta		149,760,000	APBD		60 Koperasi	299,401,160	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah koperasi yang mendapat fasilitas pembuatan Sertifikat Nomor Induk Koperasi	DKI Jakarta	60 Koperasi	149,760,000	APBD		60 Koperasi	299,401,160	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Akta Pendirian Koperasi	DKI Jakarta	60 Koperasi	149,760,000	APBD		60 Koperasi	299,401,160	Akta Pendirian Koperasi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	DKI Jakarta		2,445,573,181	APBD			4,417,834,209	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro atau kecil yang bermitra dengan Usaha Menengah atau besar dan jumlah usaha mikro dan kecil yang memperoleh perizinan	DKI Jakarta		4,070,210,755	APBD			4,417,834,209	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Nilai kepuasan pelayanan pengelolaan Jakarta Creative Hub	DKI Jakarta	4 Poin	1,820,316,355	APBD		4 Poin	3,000,000,000	Pengelolaan Jakarta Creative Hub

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Penyusunan Standardisasi Sarana Prasarana Usaha Mikro dan Kecil Pada Kawasan Penataan di Provinsi DKI Jakarta	DKI Jakarta	1 Dokumen	451,854,260	APBD		1 Dokumen	500,000,000	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuh kembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Tersedianya dokumen Masterplan PKL	DKI Jakarta	1 Dokumen	1,798,040,140	APBD		4 Poin	267,834,209	Pengembangan Aplikasi Pelaporan Pedagang Kaki Lima

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3					Urusan Pemerintahan Pilihan									
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	3 0				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	3 0	0 5			Program Pengembangan Ekspor	jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	DKI Jakarta		1,466,739,329	APBD		4250198668 USD	6,531,069,249	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	3 0	0 5	1. 0 1		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Partisipasi Pada Pameran	DKI Jakarta		1,466,739,329	APBD		1200 Pelaku Usaha	6,531,069,249	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	05	1.01	01	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Koperasi yang mengikuti HARKOPNAS EXPO	DKI Jakarta	8 Koperasi	226,927,899	APBD		8 Koperasi	226,927,899	Partisipasi Harkopnas Expo
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah UKM Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pemasaran pada Bazaar UKM	DKI Jakarta	500 UKM	520,175,150	APBD		500 UKM	901,380,450	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah UKM Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pemasaran pada UKM Expo	DKI Jakarta	200 UKM	-	APBD		200 UKM	901,380,450	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah UKM Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pemasaran pada lebaran betawi	DKI Jakarta	120 UKM	-	APBD		120 UKM	901,380,450	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah UKM Yang Mendapatkan Fasilitas Akses Pemasaran pada Sunday Market	DKI Jakarta	50 UKM	719,636,280	APBD		1400 UKM	3,600,000,000	Penyelenggaraan Bazaar UKM, Penyelenggaraan UKM Expo, Pemasaran Produk UKM Pada Acara Lebaran Betawi dan Penyelenggaraan Sunday Market
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	DKI Jakarta	100%	#REF!	APBD		100%	#REF!	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	persentase keluhan/temuan konsumen yang ditindaklanjuti	DKI Jakarta	100%	1,076,361,921	APBD		100%	1,382,506,248	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	06	1.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	DKI Jakarta	100 persen	1,076,361,921	APBD		100 persen	1,382,506,248	Partisipasi Pada Acara Hari Konsumen Nasional (HARKONAS)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Persentase produk yang diuji bermutu dan berkualitas	DKI Jakarta	75 persen	48,130,400	APBD		80 persen	118,800,000	Pelaksanaan Kurasi Produk IKM
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	06	1.02	01	Verifikasi Mutu Produk	Persentase produk yang bermutu dan berkualitas	DKI Jakarta	100 persen	27,000,000	APBD		24 Pasar	-	Pengawasan Produk SNI Wajib
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Persentase makanan dan minuman yang diuji bernilai baik	DKI Jakarta	75 persen	284,298,850	APBD		80 persen	285,454,895	Pengadaan Alat Test Uji Cepat

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARANPRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha perdagangan yang terfasilitasi mengikuti promosi produk dalam negeri	DKI Jakarta		-				4,033,658,200	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Partisipasi Pada Pemasaran Produk Dalam Negeri	DKI Jakarta		-				4,033,658,200	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	07	1.01	01	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi akses pemasaran	DKI Jakarta	400 UKM	-	APBD		90 UKM	4,033,658,200	Partisipasi Pameran Dalam Kota, Partisipasi Pameran Luar Kota dan Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia (TEI)

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Partisipasi Pada Pemasaran Produk Dalam Negeri	DKI Jakarta		-				-	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi pemasaran	DKI Jakarta	30 UKM	-					
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	30	07	1.02	01	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Peserta yang mendapatkan fasilitasi pemasaran	DKI Jakarta	30 UKM	-					
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	DKI Jakarta	72.82	3,443,867,146	APBD			2,445,400,378	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase pertumbuhan jumlah industri di DKI Jakarta	DKI Jakarta		3,443,867,146	APBD			2,445,400,378	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah kajian pembahasan isu-isu strategis sektor perindustrian	DKI Jakarta	1 Dokumen	70,000,000	APBD		200 IKM	77,000,000	Gelar Produk IKM (Penyelenggaraan Bazaar IKM dan Pekan Produk IKM)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Nilai kepuasan pelayanan penyediaan sarana dan prasarana J3C	DKI Jakarta	4 Poin	-	APBD		4 poin	1,140,166,012	Pengelolaan Jakarta Creative Content Center

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah laporan kinerja petugas sektor industri (Penyedia jasa sektor perindustrian)	DKI Jakarta	72 laporan	387,875,546	APBD		72 laporan	426,663,101	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pelaku Industri yang mengikuti Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	DKI Jakarta	450 Pelaku	-	APBD		72 laporan	-	Pendampingan Pembuatan Desain Kemasan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pertumbuhan industri kreatif animasi dan games	DKI Jakarta	180 Industri Kreatif	-	APBD		1000 IKM	-	Pendampingan Pendaftaran HKI
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pertumbuhan industri kreatif fashion dan kerajinan	DKI Jakarta	250 Industri Kreatif	-	APBD		250 Industri Kreatif	-	Pendampingan Industri kreatif Animasi & Games

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kreatif yang mendapat fasilitas pendampingan mengenai pemasaran online	DKI Jakarta	400 Industri Kreatif	-	APBD		400 Industri Kreatif	-	Pendampingan industri kreatif Fashion & Kerajinan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kecil menengah yang mendapat fasilitas pendaftaran HKI	DKI Jakarta	1000 Industri Kecil	-	APBD		1000 Industri Kecil	-	Workshop E Smart
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kreatif yang mendapat fasilitas pendaftaran sertifikasi halal	DKI Jakarta	1000 Industri Kreatif	2,985,991,600	APBD		1000 Industri Kreatif	801,571,265	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta/pelaku industri kreatif yang meningkat kemampuannya dalam mendesain kemasan produknya	DKI Jakarta	1000 Industri Kreatif	-	APBD		1000 Industri Kreatif	-	Kompetisi dan Festival Start Up Produk Kreatif sektor Animasi dan Games

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah industri kreatif yang mendapat fasilitas pemasaran pada Kompetisi dan Festival Start Up Produk Kreatif sektor Animasi dan Games	DKI Jakarta	100 industri kreatif	-	APBD		72 laporan	-	Penyediaan Jasa Sektor Perindustrian
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pendampingan Industri (Hibah ke Dekranasda)	DKI Jakarta	50 Pengrajin	1,234,133,832	APBD		50 Pengrajin	1,234,133,832	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX													
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan	DKI Jakarta	4 Poin	130,096,073,777	APBD		4 Poin	130,856,667,897	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	DKI Jakarta	100	121,983,483,631	APBD		100	121,990,090,831	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan	DKI Jakarta	100	121,974,572,831	APBD		100	121,974,572,831	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	DKI Jakarta	100	8,910,800	APBD		100	15,518,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				57,656,841					

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Bidang Tanah yang dibuat sertifikat	DKI Jakarta	3 bidang	57,656,841					
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kepuasan pelayanan administrasi umum	DKI Jakarta	4 Poin	1,276,682,437	APBD		4 Poin	1,356,807,457	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKI Jakarta	4 Poin	902,369,919	APBD		4 Poin	902,369,919	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan Alat Tulis kantor	DKI Jakarta	4 Poin	156,328,018	APBD		4 Poin	156,328,018	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI Jakarta	4 Poin	43,459,460	APBD		4 Poin	43,459,460	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	DKI Jakarta	4 Poin	136,638,120	APBD		4 Poin	136,638,120	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus, Penyediaan BBM Peralatan Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan BBM Peralatan Kerja	DKI Jakarta	4 Poin	1,660,320	APBD		4 Poin	1,660,320	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan layanan fasilitasi kunjungan tamu	DKI Jakarta	4 Poin	36,226,600	APBD		4 Poin	116,351,620	Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-					
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah mesin pembangkit listrik (Genset Diesel) yang tersedia dan dapat dimanfaatkan	DKI Jakarta	1 Unit	-	APBD		4 Poin	116,351,620	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	DKI Jakarta	4 poin	4,417,080,474	APBD		4 poin	5,118,663,674	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	DKI Jakarta	4 poin	2,022,820,000	APBD		4 poin	2,724,403,200	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) Pemeliharaan Jaringan Teknologi Informasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor terhadap penyediaan mesin fotokopi	DKI Jakarta	4 poin	112,384,800	APBD		4 poin	112,384,800	Penyediaan sewa mesin fotokopi
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan jasa pelayanan Umum Kantor terhadap perlengkapan keamanan dan jasa petugas keamanan	DKI Jakarta	4 poin	166,190,882	APBD		4 poin	166,190,882	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan, Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan jasa pelayanan Umum Kantor terhadap penyediaan jasa petugas keamanan	DKI Jakarta	4 poin	2,115,684,792	APBD		4 poin	2,115,684,792	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai kepuasan pelayanan terhadap pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	DKI Jakarta	4 poin	2,418,827,235	APBD		4 poin	2,391,105,935	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang laik Jalan/Berfungsi dan memiliki surat izin	DKI Jakarta	37 unit	27,721,300	APBD		37 unit	27,721,300	
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang laik Jalan/Berfungsi dan memiliki surat izin	DKI Jakarta	37 unit	249,095,251	APBD		37 unit	249,095,251	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO khusus, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Pemeliharaan Genset

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai kepuasan jasa pelayanan kantor terhadap pemeliharaan dan kalibrasi peralatan dan mesin lainnya	DKI Jakarta	4 poin	128,799,583	APBD		4 poin	128,799,583	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan jasa pelayanan kantor terhadap Perencanaan Pembangunan Gedung Pusat Perbengkelan Kayu Rawa Terate	DKI Jakarta	4 poin	-	APBD		4 poin	-	Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Pusat Perbengkelan Kayu Rawa Terate, Petugas Kebersihan Kantor, Rehabilitasi ringan Gedung Kantor
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan jasa pelayanan kantor terhadap Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan	DKI Jakarta	4 poin	1,939,377,726	APBD		4 poin	1,939,377,726	

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Yang Diisi	DKI Jakarta	79 tabung	73,833,375	APBD		79 tabung	73,833,375	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
	B	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		DKI Jakarta							
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		DKI Jakarta							
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		DKI Jakarta		99,014,500					

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B	3	3 0	0 6	2. 0 1	0 2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pasar yang diawasi	DKI Jakarta	22 Pasar	99,014,500	APBD		22 Pasar	108,915,950	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	A	2	1 7	0 7	1. 0 1	0 1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar / Bidang Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program Pemebrdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) / KegiatanPemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan,	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berusaha	Jakarta Pusat	8.800 Peserta	0	APBD		8.800 Peserta	909,289,280	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / Jumlah Lokasi Sementara yang direhab	Jakarta Pusat	2 Lokasi	1,125,547,610	APBD		3 Lokasi	2,988,637,440	

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat						Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / Jumlah laporan kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	408 Laporan	2,683,485,960	APBD		408 Laporan	2,833,243,822	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat							Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / Nilai kepuasan pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store	Jakarta Pusat	4 Nilai	382,441,243	APBD		4 Nilai	563,157,392	

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / persentase pembayaran hutang	Jakarta Pusat	100 Persen	1,954,643,915	APBD		0	0	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	3	30	05	2.01	03	Urusan Pemerintahan Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan / Program Pengembangan Ekspor / Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah / Jumlah Peserta Bazaar	Jakarta Pusat	560 Peserta	573,213,520	DID		840 UKM	859,820,280	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Pusat

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	3	3 1	0 2	2. 0 1	0 5	Urusan Pemerintahan Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Peridnustrian / Program Perencanaan dan Pembangunan Industri / Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah wirausaha industri baru / Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berwirausaha	Jakarta Pusat	710 Peserta	2,822,001	APBD		2.240 Wirausaha	2,870,901,568	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Pusat
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								Jumlah wirausaha industri baru / Jumlah laporan kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Pusat	Jakarta Pusat	384 Laporan	2,423,443,680	APBD		384 Laporan	2,447,053,728	Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Pusat

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								Persentase jumlah IKM yang berkualitas / Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Jakarta Pusat	90 Peserta	36,176,013	Dana Bagi Hasil				Rehabilitasi Lokasi Binaan Cempaka Sari (1946m2)
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	XX	01	2.02	03	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	indeks kepuasan pelayanan kantor / Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan	Jakarta Pusat	100 Persen	852,600	APBD		100 Persen	1,910,800	

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 6	0 2	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai kepuasan pelayanan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jakarta Pusat	4 Poin	45,444,564	APBD				
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor	Jakarta Pusat	4 Poin	19,327,352	APBD		4 Poin	36,538,711	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 6	0 5	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	Jakarta Pusat	4 Poin	18,229,090	APBD		4 Poin	26,436,190	

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 6	0 7	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional / Jumlah unit KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi/ dapat digunakan	Jakarta Pusat	5 Unit	49,463,700	APBD		5 Unit	43,583,400	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 6	0 8	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	Jakarta Pusat	4 Poin	7,860,780	APBD		4 Poin	8,677,680	Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Pusat

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 8	0 2	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Listrik dan Internet	Jakarta Pusat	4 Poin	94,630,001	APBD		4 Poin	133,994,001	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 8	0 3	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap penyediaan mesin fotokopi	Jakarta Pusat	4 Poin	28,575,360	APBD		4 Poin	37,461,600	

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 8	0 4	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jakarta Pusat	4 Poin	2,056,915,770	APBD		4 Poin	2,056,915,770	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor/Lapangan	Jakarta Pusat	4 Poin	30,511,250	APBD		4 Poin	10,587,500	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	X X	0 1	2. 0 9	0 2	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional / Jumlah Unit KDO/KDO Khusus Yang Laik Jalan/Berfungsi	Jakarta Pusat	6 Unit	66,054,686	APBD		6 Unit	56,249,374	Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Pusat

Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional / Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	Jakarta Pusat	6 Unit	9,815,960	APBD		6 Unit		Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Pusat
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat	B	X	XX	01	2.09	09	Urusan Pemerintah Pilihan / Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian / Progran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota / Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Kebersihan Kantor	Jakarta Pusat	4 Poin	1,880,608,704	APBD		4 Poin	1,880,608,704	
Dinas PPKUKM Prov. DKI Jakarta / Suku Dinas PPKUKM Kota Adm. Jakarta Pusat								indeks kepuasan pelayanan kantor / Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor/Lapangan	Jakarta Pusat	4 Poin	28,950,592	APBD		4 Poin	42,174,946	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKUT	A	2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
	A	2	17	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								
	A	2	17	07	1	01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan								

	A	2	17	07	1	01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan								
	001							Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya untuk berwirausaha	Jakarta Utara	9500 Orang	-	APBD	4800 Wirausaha	501,436,560	
	002							Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Utara	Jakarta Utara	312 Laporan	2,240,241,718	APBD	312 Laporan	2,217,442,730	

	003							Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah Lokasi PKL/UKM di Wilayah Jakarta Utara yang Direhab	Jakarta Utara	1 Lokasi	1,027,599,320	APBD	-	-	
	004							Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Utara	Nilai kepuasan pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store	Jakarta Utara	4 Poin	812,766,299	APBD	4 Poin	849,298,757	
	B	3	30	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								
	B	3	30	05	2	01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
	B	3	30	05	2	01	03	Pameran Dagang Lokal								

	001							Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah Peserta Bazaar	Jakarta Utara	200 Peserta	102,013,560	APBD	610 UKM	587,823,170	
	B	3	31	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
	B	3	31	02	2	01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
	B	3	31	02	2	01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
	001							Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah peserta yang meningkat kemampuannya untuk berwirausaha	Jakarta Utara	1600 Wirausaha Baru	-	APBD	1360 Wirausaha	1,909,786,512	

	002							Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Utara	Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Utara	Jakarta Utara	288 Laporan	1,814,407,320	APBD	288 Laporan	1,847,384,510	
	003							Sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai	Terlaksananya sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan dibidangcukai	Jakarta Utara	90 Orang	36,176,013	APBD	-	-	-
	B	X	XX	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
	B	X	XX	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	B	X	XX	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								

	001							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan	Jakarta Utara	100 Persen	930,000	APBD	100 Persen	2,035,000	
	B	X	XX	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	B	X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	001							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta Utara	4 Poin	-	APBD	4 Poin	57,791,800	
	002							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor	Jakarta Utara	4 Poin	27,967,649	APBD	4 Poin	55,288,217	

	B	X	X X	0 1	2	0 6	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								
	0 0 1							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Kebutuhan Kantor Cetakan dan Penggandaan	Jakarta Utara	4 Poin	12,624,865	APBD	4 Poin	16,159,935	
	B	X	X X	0 1	2	0 6	07	Penyediaan Bahan/Material								
	0 0 1							Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus/Peralatan Kerja	Jumlah unit KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi	Jakarta Utara	4 Unit	15,461,730	APBD	4 Poin	42,130,620	
	B	X	X X	0 1	2	0 6	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								

	001							Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman	Jakarta Utara	4 Poin	3,196,000	APBD	4 Poin	55,200,000	
	B	X	XX	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	B	X	XX	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								

	001							Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Jakarta Utara	4 Poin	130,926,120	APBD	4 Poin	155,222,949	
	B	X	XX	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
	001							Penyediaan sewa mesin fotocopy	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	Jakarta Utara	4 Poin	37,461,600	APBD	4 Poin	37,461,600	
	B	X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

	001							Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Jakarta Utara	4 Poin	1,408,013,856	APBD	4 Poin	1,410,456,528	
	002							Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Perlengkapan Keamanan Kantor	Jakarta Utara	4 Poin	-	APBD	4 Poin	1,386,440	
	B	X	XX	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
	B	X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								

	001							Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus Yang Laik Jalan/Berfungsi	Jakarta Utara	4 Unit	18,384,190	APBD	4 Unit	18,384,190	
	002							Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	Jakarta Utara	4 Unit	4,168,800	APBD	4 Unit	3,842,000	
	B	X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
	001							Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta Utara	4 Poin	3,726,327	APBD	4 Poin	39,481,662	
	B	X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

	001							Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor	Jakarta Utara	4 Poin	1,173,344,880	APBD	4 Poin	1,175,380,440	
	002							Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Jakarta Utara	4 Poin	41,741,788	APBD	4 Poin	40,380,538	
Jumlah												8,911,152,035			11,023,774,158	-
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**									
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01		**Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**									

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	**Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan**	**Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berusaha**	**Jakarta Barat**	**8000 orang**	**2,636,828,542**	**APBD**	-	**8000 orang**	**4,555,231,493**	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berusaha	Jakarta Barat	8000 orang	-	APBD	Ada pengurangan anggaran, target dicapai melalui Kolaborasi	8000 orang	862,912,480	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Pendamping	Jakarta Barat	408 Laporan	2,608,831,326	APBD	-	408 Laporan	2,899,727,943	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Barat
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Persentase pembayaran hutang	Jakarta Barat	100 Persen	27,997,216	APBD	-	-	-	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Lokasi Sementara yang ditata	Jakarta Barat	1 Lokasi	-	-	-	1 Lokasi	696,909,638	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Nilai Kepuasan Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Barat	Jakarta Barat	4 Poin	-	-	-	1 Gedung	79,200,000	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Nilai Kepuasan Kantor Terhadap Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Barat	Jakarta Barat	4 Poin	-	-	-	4 Poin	16,481,432	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**3**	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**3**	**3 0**	**0 5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**									
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**3**	**3 0**	**0 5**	**2. 0 1**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**									Pelaksanaan Bazaar di Wilayah Jakarta Barat
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**3**	**3 0**	**0 5**	**2. 0 1**	**0 3**	**Pameran Dagang Lokal**	**Jumlah Peserta Bazaar**	**Jakarta Barat**	**580 Peserta**	**546,930, 560**	**APBD**	**Dana Intensif Daerah**	**840 UKM**	**859,820,280**	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Peserta Bazaar	Jakarta Barat	580 Peserta	546,930,560	APBD	Dana Intensif Daerah	840 UKM	859,820,280	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**A**	**3**	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**A**	**3**	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**									Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Barat

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**A**	**3**	**3 1**	**0 2**	**1. 0 1**		**Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi**									Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Barat
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**A**	**3**	**3 1**	**0 2**	**1. 0 1**	**0 5**	**Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat**	**Jumlah wirausaha baru Industri**	**Jakarta Barat**	**2.240 Laporan**	**2,469,285,278**	**APBD**	**-**	**2.240 Laporan**	**5,221,566,662**	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Industri
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	3	3 1	0 2	1. 0 1	0 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah laporan kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Barat	Jakarta Barat	384 Laporan	2,430,287,264	APBD	-	384 Laporan	2,448,436,494	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berwirausaha	Jakarta Barat	2.240 Peserta	2,822,001	APBD	1. Anggaran digunakan untuk pembayaran Akun Zoom Online selama 1 Tahun untuk Pelaksanaan Pelatihan Online 2. Akibat Kebijakan PPKM dilaksanakan secara online dan melakukan pelatihan kolaborasi tanpa Anggaran	2.240 Peserta	2,757,618,232	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai	Jakarta Barat	90 Peserta	36,176,013	APBD	-	-	-	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Barat	Jakarta Barat	4 Poin	-	-	-	4 Poin	15,511,936	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**													Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**									Penyediaan Alat Tulis Kantor

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**									Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**	**03**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	**Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan**	**Jakarta Barat**	**100 Persen**	**1,653,600**	**APBD**		**APBD**	**2,440,300**	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**	**03**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan	**Jakarta Barat**	**100 Persen**	**1,653,600**	**APBD**		**APBD**	**2,440,300**	Penyediaan Makanan dan Minuman

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Nilai kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jakarta Barat**	**4 Poin**	**100,566,741**	**APBD**		**APBD**	**179,917,708**	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor	Jakarta Barat	4 Poin	37,521,649	APBD		APBD	62,210,951	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jakarta Barat	4 Poin	33,510,015	APBD		APBD	59,268,671	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	Jakarta Barat	4 Poin	20,982,665	APBD		APBD	29,397,286	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Bahan/Material	Jakarta Barat	4 Poin	3,043,920	APBD		APBD	24,904,800	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jakarta Barat	4 Poin	5,508,492	APBD		APBD	4,136,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**	**08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jakarta Barat**	**4 Poin**	**2,698,936,741**	**APBD**		**APBD**	**2,811,580,558**	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jakarta Barat	4 Poin	307,941,761	APBD		APBD	408,838,078	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Mesin Fotokopi	Jakarta Barat	4 Poin	37,461,600	APBD		APBD	37,461,600	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Mesin Fotokopi	Jakarta Barat	4 Poin	2,772,500	APBD	-	APBD	-	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jakarta Barat	4 Poin	2,350,760,880	APBD		APBD	2,350,760,880	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat		X	XX	01	2.02	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Petugas Keamanan Kantor/Lapangan	Jakarta Barat		-	APBD		APBD	14,520,000	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat																
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	**B**	**X**	**XX**	**01**	**2.02**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jakarta Barat**	**4 Poin**	**2,396,058,064**	**APBD**		**APBD**	**2,443,091,980**	Pembinaan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang layak jalan/berfungsi	Jakarta Barat	4 Unit	18,226,604	APBD		APBD	55,704,440	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Selatan

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	Jakarta Barat	4 Unit	4,132,500	APBD		APBD	8,977,500	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara	Jakarta Barat	4 Jenis	3,421,770	APBD		APBD	8,394,760	Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Selatan
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Kebersihan Kantor	Jakarta Barat	4 Poin	2,350,760,880	APBD		APBD	2,350,760,880	Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	B	X	XX	01	2.02	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor/Lapangan	Jakarta Barat	4 Poin	19,516,310	APBD		APBD	19,254,400	
TOTAL											**10,850,259,526**				**16,073,648,981**	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	A	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	A	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berusaha	Kotamadya Jakarta Selatan	8000 Peserta	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	8000 Wirausaha	947,572,500	

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Loksem PKL yang direhab	Kotamadya Jakarta Selatan	1 Lokasi	16,650,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	2 Lokasi	882,146,794	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	504 Laporan	3407391830	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	504 Laporan	3,577,420,590	

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Nilai Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	1,019,694,684	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	1,232,624,038	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kot									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Peserta Bazaar	Kotamadya Jakarta Selatan	680 UKM	691,284,000	Dana Insentif Daerah (DID)		1020 UKM	1,044,722,580	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berwirausaha	Kotamadya Jakarta Selatan	1289 Peserta	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0	2600 Wirausaha	3,194,340,300	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Selatan	Kotamadya Jakarta Selatan	480 Laporan	3,029,304,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	480 Laporan	3,051,236,730	

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai	Kotamadya Jakarta Selatan	90 Peserta	36,176,013	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	-	-	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX												
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan	Kotamadya Jakarta Selatan	100 Persen	1,296,980	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	100 Persen	2,707,200	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX													
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Ketersediaan Alat Tulis Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	23,206,453	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Poin	86,864,228	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX													
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dilakukan Pengapusan Anggaran Karena SPD Tidak Terbit	4 Poin	4,531,835	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang Berfungsi/Dapat Digunakan	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Unit	11,068,800	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	16,142,000	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	6,204,000	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	6,204,000	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Pelayanan Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	74,392,109	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	5,644,001	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												Pendampingan Kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Sewa Mesin Foto Copy	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	37,461,600	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	37,461,600	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Terhadap Keamanan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	1,234,149,462	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	1,254,477,462	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang Terpelihara	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Unit	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dilakukan Pengapusan Anggaran Karena SPD Tidak Terbit	6 Unit	79,896,513	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang Memiliki Surat Izin	Kotamadya Jakarta Selatan	6 Unit	8,394,400	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	6 Unit	6,834,400	
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												Pilot Plant Instalasi Pembuatan garam di Wilayah Kepulauan Seribu

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Jasa Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	-	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dilakukan Pengapusan Anggaran Karena SPD Tidak Terbit	4 Poin	32,449,747	Pendampingan Kewirausahaan IKM di Wilayah Kepulauan Seribu
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Kepulauan Seribu

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Pendampingan Desain Kemasan di Wilayah Kepulauan Seribu
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Pelayanan Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	1,469,225,550	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	1,469,225,550	Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal di Wilayah Kepulauan Seribu
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	XX												

Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Adm Jakarta Selatan	B	X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Perlengkapan Petugas Kebersihan Kantor/Lapangan	Kotamadya Jakarta Selatan	4 Poin	55,967,340	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	4 Poin	45,678,369	Penyediaan jasa administrasi keuangan
											11,121,867,821					

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	A	2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	- Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Jakarta Timur	27,799		APBD				
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	A	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	- Jumlah usaha mikro atau kecil yang bermitra dengan Usaha Menengah atau besar dan jumlah usaha mikro dan kecil yang memperoleh perizinan		27,799						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	A	2	17	07	1	01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	- Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur (42 orang) - Jumlah Loksem PKL yang direhab - Nilai Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur - Jumlah laporan kinerja PJLP Kebersihan (13 orang) - Jumlah laporan kinerja PJLP Keamanan (13 orang) - Jumlah Lokasi Binaan yang direhab		-12 Laporan - 1 Lokasi - 4 poin -12 Laporan -12 Laporan - 1 Lokasi	7,077,979,777			- Jumlah laporan kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur= 504 Laporan - Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berwirausaha = 8.000 Wirausaha - Nilai Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Tempat	8,079,254,897	

														Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur = 4Poin - Jumlah Rehab Gedung Tempat Kumpul Kreatif dan Betawi Store di Wilayah Jakarta Timur = 4Lokasi - Nilai Kepuasan Penyediaan Perlengkapan Seragam Pendamping Kewira		

														usahaan UKM di Wilayah Jakarta Timur = 4Poin		

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	- jumlah ekspor yang dilakukan UKM DKI Jakarta	Jakarta Timur			APBD				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	- Jumlah Pelaku Usaha Yang Difasilitasi Dalam Partisipasi Pada Pameran		680 Orang					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	3	30	5	2	01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang mendapat Fasilitasi Akses Pemasaran		680 Orang	1,082,380,200			Jumlah UKM yang mendapat Fasilitasi Akses Pemasaran = 1700 UKM	1,406,860,048	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	- Jumlah wirausaha industri baru - Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif - Persentase jumlah IKM yang berkualitas - Persentase produk IKM bebas bahan berbahaya	Jakarta Timur			APBD				Penyediaan Makanan dan Minuman

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	- Persentase pertumbuhan jumlah industri di DKI Jakarta							

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	3	31	02	2	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	- Jumlah Peserta yang Tumbuh Menjadi Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Timur - Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Timur (40 orang) - Terlaksananya Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai		- 2600 Orang - 12 Laporan - 90 Orang	3,065,480,613			- Jumlah Laporan Kinerja PJLP Pendamping Kewirausahaan IKM di Wilayah Jakarta Timur = 480 Laporan - Jumlah Peserta yang Meningkat Kemampuannya untuk Berwirausaha = 2600 Wirausaha - Nilai Kepuasan Perlengkapan Pendampingan Kewirausahaa	6,496,772,010	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)

														n IKM di Wilayah Jakarta Timur = 4 Poin		

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	- indeks kepuasan pelayanan kantor- indeks kepuasan pelayanan kantor- indeks kepuasan pelayanan kantor- indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional- indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional- indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan							Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Persentase penyelesaian administrasi keuangan		100 persen	2,890,000			Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan = 100 Persen	4,129,500	
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah								Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-Nilai Kepuasan Pelayanan terhadap Ketersediaan Alat Tulis Kantor		4 Poin	25,819,145			Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor = 4 Poin	264,559,955	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor	Jakarta Timur			APBD				
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah								

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan		4 Poin	4,202,880			Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan = 4Poin	4,996,943	
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional				APBD				Penyediaan jasa keamanan kantor

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	XX	01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jakarta Timur						
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	XX	01	2	06	Penyediaan Bahan/Material	- Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Bahan/Material		4 Poin	7,263,900			Nilai Kepuasan Pelayan Kantor Terhadap Penyediaan Bahan/ Material = 4 poin	16,510,960	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM															Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah							Penyediaan Jasa Upah Pegawai Non ASN BLUD UPK PPUKMP Pulogadung
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Poin	15,923,600			Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu = 4 Poin	28.793.600	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah							

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Nilai kepuasan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		4 Poin	49,179,521			Nilai kepuasan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik = 4 poin	51,572,961	Penyediaan Petugas Teknis Pembantu Pelaksanaan Peneraan di Metrologi
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah							
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 8	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Nilai Kepuasan Pelayanan terhadap Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi		4 Poin	34,339,800			Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor = 4 Poin	37,461,600	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah							#REF!

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	XX	01	2	08	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah laporan kinerja PJLP Keamanan (43 Orang)		12 Laporan	2,527,067,946			Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor = 4 Poin	2,567,102,666	#REF!
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM																#REF!

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				#REF!
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah							#REF!

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin		6 Unit	19,567,100			Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi dan memiliki surat izin = 10 Unit		
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				#REF!

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM				01			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah							#REF!
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	XX	01	2	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi		6 Unit	15,173,235			Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi dan memiliki surat izin = 10 Unit	57,385,407	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				#REF!
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah							#REF!

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Nilai Kepuasan Pelayanan terhadap Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja		4 Poin	790,427			Nilai Kepuasan Jasa Pelayanan Kantor Terhadap Pemeliharaan dan kalibrasi Peralatan dan Mesin Lainnya = 4 poin	35.834.997	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				#REF!
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Pelaksanaan pengisian alat pemadam api ringan

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	XX	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah laporan kinerja PJLP Kebersihan (50 Orang)		12 Laporan	2,938,451,100			Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya = 4 Poin	2,938,451,100	

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kantor - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional - indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Jakarta Timur			APBD				
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1			Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah							

SUKU DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA - JAKTIM	B	X	X X	0 1	2	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor		4 poin	6,816,568			Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya = 4 Poin	52,612,802	Pelaksanaan sidang tera ulang pasar dan terbentuknya daerah tertib ukur
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2					Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17							2,212,932,235				5,168,608,340	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kab Adm Kepulauan Seribu	27797 UMKM	734,220,517	APBD		27797 UMKM	2,891,018,125	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kab Adm Kepulauan Seribu	27797 UMKM	734,220,517	APBD		27797 UMKM	2,891,018,125	Pelaksanaan Audit Internal, Pemb. Sistem Informasi Lab, KUM, Surveilen Lab Uji, Pengemb. Kemampuan Uji Personil Lab, Penyediaan Jasa Petugas Lab
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Laporan Kinerja pendamping kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	Kab Adm Kepulauan Seribu	12 Laporan	606,349,464	APBD		12 Laporan	606,142,080	Pelaksanaan Uji Banding Antar Lab

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya keterampilan Peserta UKM	Kab Adm Kepulauan Seribu	400 UKM	67,009,800	APBD		250 UKM	202,216,476	
							Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Perencanaan Pembangunan PKL		1 Lokasi	60,861,253	APBD		0	-	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Lokasi Binaan yang dibangun	Kab Adm Kepulauan Seribu	3 Lokasi	-	APBD		0	2,074,629,833	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Nilai Kepuasan Pelayanan kantor terhadap perlengkapan pendampingan kewirausahaan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	-	APBD		4 Poin	8,029,736	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	DKI Jakarta	27797 UMKM	450,103,000	APBD		27797 UMKM	599,427,028	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Kab Adm Kepulauan Seribu	27797 UMKM	450,103,000	APBD		27797 UMKM	599,427,028	Penyediaan ATK, Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor,
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Peserta Kegiatan pameran Bazar di wilayah Kepulauan Seribu	Kab Adm Kepulauan Seribu	208 UKM	292,727,625	APBD		400 UKM	337,130,768	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	30	05	1.01	02	Pameran Dagang Lokal	Jumlah kegiatan partisipasi pameran produk unggulan berupa pameran Apkasi	Kab Adm Kepulauan Seribu	208 UKM	157,375,375	APBD		6 UKM	262,296,260	Pengadaan Bahan Bakar KDO, Pengadaan Bahan dan Alat Bantu Lab
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									Penyediaan Makanan dan Minuman

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	DKI Jakarta	72.8%	759,972,114			72.8%	1,033,652,006	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri provinsi	Persentase pertumbuhan jumlah Industri Kreatif	DKI Jakarta	72.8%	759,972,114			72.8%	1,033,652,006	Pengadaan Alat Uji Lab

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terciptanya Pilot Plant Instalasi Pembuatan Garam	Kab Adm Kepulauan Seribu	-	-	APBD		1 Lokasi	-	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah laporan kinerja pendamping kewirausahaan IKM	Kab Adm Kepulauan Seribu	12 Laporan	606,349,464			12 Laporan	606,142,080	Penyediaan Jasa TALI

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya keterampilan Peserta WUB Industri	Kab Adm Kepulauan Seribu	240 IKM	17,126,450	APBD		150 IKM	239,989,030	Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendampingan Desain Kemasan	Kab Adm Kepulauan Seribu	8000 pcs	33,758,500	APBD		80 IKM	42,535,760	Penyediaan Jasa Petugas Keamanan Kantor dan Penyediaan Perlengkapan Petugas Kemanan Kantor

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pendaftaran Sertifikasi Halal	Kab Adm Kepulauan Seribu	30 Paket	102,737,700	APBD		30 Paket	102,737,700	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				-			50 Merek	34,217,700	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus, Pemeliharaan KDO Khusus

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	3	31	02	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				-			4 Poin	8,029,736	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja, Pemeliharaan Alat Lab dan Perkakas Kerja Lab, Kalibrasi Alat Lab
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	268,636,604	APBD		4 Poin	644,511,181	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor, Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor, Pemeliharaan Bangunan Lab

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	APBD		4 poin	3,000,000	Penyediaan Jasa Petugas ME Kantor
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kab Adm Kepulauan Seribu	100 Persen	2,050,000	APBD		100 Persen	3,000,000	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin		APBD		4 Poin	521,949,713	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	7,296,454	APBD		4 Poin	146,109,744	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan alat tulis Kantor	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	21,078,893	APBD		4 Poin	38,789,669	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	2,003,232	APBD		4 Poin	3,912,150	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus Yang BBMnya Terpenuhi	Kab Adm Kepulauan Seribu	3 Unit	11,530,000	APBD		3 Unit	5,765,000	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	6,442,656	APBD		4 Poin	21,784,820	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Pelayanan kantor terhadap penyediaan jasa akomodasi dan transportasi di wilayah Kepulauan Seribu	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	146,579,790	APBD		4 Poin	291,554,090	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	XX	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Kepuasan Pelayanan kantor terhadap penyediaan Sarana dan Prasarana di wilayah Kepulauan Seribu	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	-	APBD		4 Poin	14,034,240	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	-	APBD		4 Poin	101,309,181	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Pelayanan kantor terhadap penyediaan jasa telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	37,599,579	APBD		4 Poin	63,847,581	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap penyediaan mesin fotokopi	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	34,056,000	APBD		4 Poin	37,461,600	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Adm Kepulauan Seribu		-				18,252,287	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus Yang Laik Jalan/Berfungsi	Kab Adm Kepulauan Seribu	3 Unit	-	APBD		3 Unit	3,421,770	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	Kab Adm Kepulauan Seribu	3 Unit	-	APBD		3 Unit	363,000	

Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan pelayanan kantor terhadap Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	-	APBD		4 Poin	10,484,549	
Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	A	X	X X	0 1	1. 0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan Pemeliharaan Perlengkapan Kerja	Kab Adm Kepulauan Seribu	4 Poin	-	APBD		4 Poin	3,982,968	

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya dengan mengikuti pelatihan (Penilaian Kesehatan KSP/USP)	DKI Jakarta	120 orang	354,084,788	DAK		120 orang	354,084,788	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya dengan mengikuti pelatihan Kompetensi Bagi Pengurus/Pengelola KSP/USP (DAK)	DKI Jakarta	120 orang	461,492,827	DAK		120 orang	461,492,827	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya dengan mengikuti pelatihan Manajemen Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Unit Simpan Pinjam Berbasis IT (DAK)	DKI Jakarta	120 orang	411,353,648	DAK		120 orang	411,353,648	

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya dengan mengikuti pelatihan Manajemen Koperasi Berbasis Syariah (DAK)	DKI Jakarta	120 orang	354,084,788	DAK		120 orang	354,084,788	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	DKI Jakarta	320 orang	1,203,782,411	DAK		320 orang	1,342,148,761	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro atau kecil yang bermitra dengan Usaha Menengah atau besar dan jumlah usaha mikro dan kecil yang memperoleh perizinan	DKI Jakarta	320 orang	1,203,782,411	DAK		320 orang	1,342,148,761	

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM binaan yang terampil perpajakan	DKI Jakarta	160 orang	434,060,928	DAK		160 orang	434,060,928	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Pendamping KUKM	DKI Jakarta	11 orang	368,500,000	DAK		11 orang	368,500,000	

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UKM binaan yang terampil prosedur ekspor	DKI Jakarta	160 orang	401,221,483	DAK		160 orang	401,221,483	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	DKI Jakarta	320 orang	137,087,000	APBD		320 orang	137,087,000	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah Pelaku UMKM Naik Kelas	DKI Jakarta	320 orang	137,087,000	APBD		320 orang	137,087,000	

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM binaan yang terampil berwirausaha	DKI Jakarta	20 orang	-	APBD		20 orang		Pelatihan Kewirausahaan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya mengenai Bahan Makanan dalam Kemasan Tertutup	DKI Jakarta	40 orang	-	APBD		40 orang		Pelaksanaan Bimtek Pemahaman Bahan Makanan dalam Kemasan Tertutup (BDKT)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya mengenai kandungan berbahaya dan beracun bagi UKM	DKI Jakarta	40 orang	-	APBD		40 orang		Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengenalan dan Pemahaman Kandungan Bahan Berbahaya dan Beracun Bagi UKM

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya mengenai Good Hygienic Practices dan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Berbasis Hazard Analysis Critical Point	DKI Jakarta	-	-	APBD		40 orang		Pelaksanaan Bimtek Good Hygienic Practices dan Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan Berbasis Hazard Analysis Critical Point
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Jumlah Pendamping Kecamatan yang mengikuti Diklat Pendamping Kecamatan	DKI Jakarta	60 orang	137,087,000	APBD		60 orang	137,087,000	Diklat Peningkatan SDM Pendamping Kecamatan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UKM binaan yang terampil dengan pemahaman Perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	DKI Jakarta	40 orang	-	APBD		40 orang		Pelaksanaan Bimtek Strategi Perolehan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya mengenai SPP-PIRT	DKI Jakarta	40 orang	-	APBD		40 orang		Pelatihan Diklat Negosiasi Bisnis dan Manajemen Biaya Bagi UKM
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya mengenai Display Penataan Produk	DKI Jakarta	40 orang	-	APBD		40 orang		Pelaksanaan Bimtek Display Penataan Produk

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	2	17	08	1.01	01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta yang meningkat pemahamannya mengenai Manajemen Retail bagi UKM	DKI Jakarta	40 orang	-	APBD		40 orang		Diklat Manajemen Retail Bagi UKM
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X					Urusan Pemerintahan Utama									
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX													

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	DKI Jakarta	4 Poin	1,176,803,295			4 Poin	1,369,068,580	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	DKI Jakarta	4 Poin	1,596,620			4 Poin	3,518,000	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	DKI Jakarta	100%	1,596,620	APBD		100%	3,518,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	DKI Jakarta	4 Poin	309,483,792	APBD		4 Poin	320,415,658	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Kantor Terhadap pelayanan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	DKI Jakarta	4 Poin	78,156,536	APBD		4 Poin	78,156,536	Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Kantor Terhadap pelayanan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI Jakarta	4 Poin	176,470,272	APBD		4 Poin	176,470,272	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai Kepuasan Kantor Terhadap pelayanan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI Jakarta	4 Poin	-	APBD		4 Poin	3,456,266	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Kantor Terhadap pelayanan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI Jakarta	4 Poin	30,710,900	APBD		4 Poin	38,186,500	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Kantor Terhadap pelayanan penyediaan bahan/material	DKI Jakarta	4 Poin	11,738,084	APBD		4 Poin	11,738,084	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Makanan dan Minuman	DKI Jakarta	4 Poin	12,408,000	APBD		4 Poin	12,408,000	Penyediaan Makanan dan Minuman
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Poin	654,427,929	APBD		4 Poin	654,579,890	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	DKI Jakarta	4 Poin	93,729,950	APBD		4 Poin	93,729,950	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor (mesin fotokopi)	DKI Jakarta	4 Poin	93,005,000	APBD		4 Poin	93,005,000	Penyediaan Sewa Mesin Foto Copy
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (petugas keamanan)	DKI Jakarta	4 Poin	411,383,154	APBD		`	411,383,150	Penyediaan Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (perlengkapan petugas keamanan)	DKI Jakarta	4 Poin	56,309,825	APBD		4 Poin	56,461,790	Penyediaan Perlengkapan Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4 Poin	211,294,954	APBD		4 Poin	390,555,032	
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO/KDO Khusus yang berfungsi/laik dan memiliki surat izin	DKI Jakarta	2 Unit	10,551,739	APBD		2 Unit	12,191,939	Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai kepuasan Jasa pelayanan kantor terhadap Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan dan mesin lainnya	DKI Jakarta	4 poin	1,640,200	APBD		4 poin	2,953,012	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Jasa Petugas Kebersihan Kantor)	DKI Jakarta	4 Poin	22,795,949	APBD		4 Poin	22,795,949	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Pemeliharaan Gedung Kantor)	DKI Jakarta	4 Poin	176,307,066			4 Poin	176,307,066	Penyediaan Jasa Petugas Kebersihan Kantor
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor Terhadap Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya (Perlengkapan Kebersihan Kantor)	DKI Jakarta	4 Poin	-	APBD		4 Poin	176,307,066	Pemeliharaan Gedung Kantor
	TOTAL										#VALUE!					

UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A															
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	X X	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan kantor	DKI Jakarta	4	8,525,659,672	APBD		4	11,113,862,219	

UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	4	3,055,402,896	APBD		4	5,659,735,130	
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan pelayanan Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	DKI Jakarta	4	234,489,840	APBD		4	0	

UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai kepuasan jasa pelayanan umum kantor	DKI Jakarta	4	2,820,913,056	APBD		4	5,659,735,130	
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan kualitas barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	4	352,614,132	APBD		4	352,614,132	

UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	DKI Jakarta	4	352,614,132	APBD		4	352,614,132	
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks kepuasan layanan BLUD	DKI Jakarta	4	5,117,642,644	APBD dan BLUD		4	5,101,512,957	

UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA PERMUKIMAN PULOGADUNG	A	X	XX	01	1.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Nilai kepuasan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	DKI Jakarta	4	5,117,642,644	APBD dan BLUD		4	5,101,512,957	
TOTAL											8,525,659,672			11,113,862,219		
																866,718,908.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	**A**	**3**	**30**	**6**				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							0	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	3	30	06	1.02	2	Pengembangan Layanan Pengujian		DKI Jakarta		1,902,868,262.00			4 poin	1,763,070,660.00	-

UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pelayanan Kemetrologian	Jumlah Sistem Pelayanan Kemetrologian yang Dikembangkan dan Dikelola	DKI Jakarta	I UNIT	129,797,602.00	APBD		-	-	208,414,932.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	2						Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kemetrologian (PHL)	Jumlah Laporan Kinerja Petugas Teknis Pembantu Pelaksanaan Peneraan	DKI Jakarta	12 LAPORAN	1,763,070,660.00	APBD		-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	3						Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kemetrologian	Jumlah laboratorium yang dilakukan akreditasi	DKI Jakarta	1 JENIS	10,000,000.00	APBD		-	-	105,554,760.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	**A**	**X**	**XX**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		DKI Jakarta					-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	DKI Jakarta	100 PERSEN	2,111,800.00	APBD		100 persen	2,877,000.00	182,652,800.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		DKI Jakarta		395,451,078.00			-	-	-

UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap ketersediaan alat tulis kantor	DKI Jakarta	4 POIN	99,705,485.00	APBD		4 poin	866,718,908.00	37,461,600.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	2						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKI Jakarta	4 POIN	295,745,593.00	APBD		-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		DKI Jakarta		248,409,832.00			-	-	195,549,683.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai kepuasan penyediaan kantor terhadap penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DKI Jakarta	4 POIN	248,409,832.00	APBD		4 poin	208,414,932.00	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.06	7	Penyediaan Bahan/Material		DKI Jakarta					-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah unit KDO/KDO khusus yang kebutuhan BBMnya terpenuhi/ dapat digunakan	DKI Jakarta	8 UNIT	105,554,760.00	APBD		4 poin	105,554,760.00	3,453,663,697.00

UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		DKI Jakarta		18,048,000.00			-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan Makanan dan Minuman	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	DKI Jakarta	4 POIN	18,048,000.00	APBD		4 poin	182,652,800.00	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		DKI Jakarta		37,461,600.00			-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan Sewa Mesin Fotocopy	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan sewa mesin foto copy	DKI Jakarta	4 POIN	37,461,600.00	APBD		4 poin	37,461,600.00	15,887,228,877.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		DKI Jakarta		194,853,683.00			-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI							Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin	DKI Jakarta	8 UNIT	14,780,000.00	APBD		8 unit	195,549,683.00	-

UNIT PENGELOLA METROLOGI							Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	Jumlah Unit KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi	DKI Jakarta	8 UNIT	180,073,683.00	APBD		-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		DKI Jakarta		3,302,944,193.00			-	-	10,321,630.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang terpelihara	DKI Jakarta	117 UNIT	239,363,630.00	APBD		4 poin	3,453,663,697.00	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	2						Pemeliharaan Alat Kemetrologian	Jumlah alat standar kemetrologian yang terpelihara	DKI Jakarta	5 UNIT	2,896,542,593.00	APBD		-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	3						Peningkatan Standarisasi Kemetrologian	Jumlah alat standar kemetrologian yang dilakukan kalibrasi eksternal	DKI Jakarta	15 UNIT	167,037,970.00	APBD		-	-	296,892,990.00
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		DKI Jakarta		1,566,854,217.00			-	-	-
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Penyediaan Jasa Pengelolaan Air Limbah	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan jasa pengolahan limbah	DKI Jakarta	4 POIN	128,854,880.00	APBD		4 poin	15,887,228,877.00	-

UNIT PENGELOLA METROLOGI	2						Perencanaan Rehab Gedung Instalasi	Jumlah dokumen perencanaan rehab gedung	DKI Jakarta	1 DOKUMEN	476,764,530.00	APBD		-	-	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	3						Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah bangunan gedung yang laik fungsi	DKI Jakarta	1 GEDUNG	961,234,807.00	APBD		-	-	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	A	X	XX	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		DKI Jakarta		10,321,630.00			-	-	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Pengisian Alat Pemadam Api Ringan	Jumlah APAR yang berfungsi	DKI Jakarta	22 UNIT	10,321,630.00	APBD		22 tabung	10,321,630.00	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	**B**	**3**	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		DKI Jakarta					-	-	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	B	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		DKI Jakarta					-	-	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	B	3	30	06	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		DKI Jakarta		354,096,688.00			123 pasar	296,892,990.00	

UNIT PENGELOLA METROLOGI	1						Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar dan Pembentukan Daerah Tertib Ukur		DKI Jakarta		-			-	-	
UNIT PENGELOLA METROLOGI	2						Penyediaan Alat Penunjang Kemetrologian	Nilai kepuasan penyediaan kantor terhadap penyediaan alat penunjang kemetrologian	DKI Jakarta	4 POINT	354,096,688.00	APBD		-	-	
TOTAL											8,138,975,743.00			23,010,407,537.00		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									

UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	3	30	06	1.02	02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produk yang diuji bermutu dan berkualitas	DKI JAKARTA	76%	1,366,525,200	PAD		76%		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	Nilai Kepuasan Pelayanan Pengujian	DKI JAKARTA	4 Nilai	1,328,225,200	PAD		4 Nilai	1,621,708,300	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	3	30	06	1.02	03	Pengembangan Layanan Sertifikasi	Jumlah dokumen hasil re-akreditasi laboratorium uji yang tersedia	DKI JAKARTA	1 Dokumen	38,300,000	PAD				
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	XX					XX									
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan	DKI JAKARTA	4 indeks	2,410,000			4 indeks		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	02	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	DKI JAKARTA	100%	2,410,000	PAD		100%	4,460,980	

UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4 indeks	947,207,594			4 indeks		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKI JAKARTA	4 Nilai	281,600,975	PAD		4 Nilai	519,339,305	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai Kepuasan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	4 Nilai	28,920,837	PAD		4 Nilai	41,906,620	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Nilai Kepuasan Penyediaan Bahan dan Material	DKI JAKARTA	4 Nilai	608,855,782	PAD		4 Nilai	1,000,953,447	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Kepuasan Layanan Fasilitasi Kunjungan Tamu	DKI JAKARTA	4 Nilai	27,830,000	PAD		4 Nilai	176,103,400	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah		4 indeks	1,255,727,000			4 indeks		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.06	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat laboratorium yang dimanfaatkan	DKI JAKARTA	8 Unit	1,255,727,000	PAD		11 Unit	6,069,842,900	

UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks	2,043,804,595			4 indeks		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DKI JAKARTA	4 Nilai	643,031,330	PAD		4 Nilai	818,663,820	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	4 Nilai	25,977,600	PAD		4 Nilai	34,461,600	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Kepuasan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	4 Nilai	1,374,795,665	PAD		4 Nilai	1,560,993,719	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 indeks	2,201,554,713			4 indeks		
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah KDO yang berfungsi dan mendapatkan surat izin	DKI JAKARTA	8 unit	41,537,647	PAD		8 unit	72,098,574	

UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Kepuasan Pemeliharaan dan Kalibrasi Peralatan Laboratorium Serta Mesin Kantor	DKI JAKARTA	4 Nilai	680,650,534	PAD		4 Nilai	8,019,800,043	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan layanan kebersihan, pengelolaan limbah dan kelaikan gedung kantor	DKI JAKARTA	4 Nilai	1,361,095,696	PAD		4 Nilai	151,630,080	
UNIT INDUSTRI KERAJINAN DAN TEKSTIL	A	X	XX	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai kepuasan Layanan mekanikal elektrikal kantor	DKI JAKARTA	4 Nilai	118,270,836	PAD		4 Nilai	131,831,170	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	3					Urusan Pemerintahan Pilihan									
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan									

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	3	3 0	0 6			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah pasar yang menjual produk ber SNI, produk makanan minuman dan menggunakan alat Kemetrologian yang diawasi	DKI Jakarta	24	1,360,71 1,823	APBD		24	1,384,960,500	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	3	3 0	0 6	1. 0 2		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		DKI Jakarta			APBD				

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	3	30	06	1.02	02	Pengembangan Layanan Pengujian	- Jumlah laboratorium pengujian hasil pengauditan yang memenuhi standar - persentase ketersediaan layanan informasi laboratorium - Persentase layanan laboratorium uji - Jumlah laboratorium uji yang terakreditasi - Jumlah Personil Lab yang meningkat kompetensinya - Jumlah laporan kinerja petugas laboran	DKI Jakarta	- 1 Laboratorium - 100 % - 100 % - 1 Laboratorium - 6 Orang - 240 Laporan	1,353,911,823	APBD		4 Poin	1,384,960,500	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	3	30	06	1.02	04	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Pelaksanaan Uji Banding Antar Laboratorium Uji	DKI Jakarta	1 Kali	6,800,000	APBD		-	-	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X														

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	X X													
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	X X	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan	DKI Jakarta	4 Poin	3,370,668,226	APBD		4 Poin	8,232,774,790	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	X X	0 1	1. 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	DKI Jakarta	100		APBD		100		
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	X X	0 1	1. 0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian administrasi keuangan	DKI Jakarta	100%	2,025,180	APBD		100%	2,615,900	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	X X	0 1	1. 0 6		Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah								

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap perlengkapan kantor - Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	DKI Jakarta	- 4 Poin - 4 Poin	172,310,199	APBD		4 Poin	199,782,434	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Nilai kepuasan pelayanan terhadap kebutuhan kantor cetakan dan penggandaan	DKI Jakarta	4 Poin	34,726,670	APBD		4 Poin	78,504,800	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.06	07	Penyediaan Bahan Material	- Jumlah KDO yang berfungsi/dapat digunakan -Nilai kepuasan pelayanan terhadap Pengadaan Bahan dan Alat Bantu Laboratorium	DKI Jakarta	- 7 Unit - 4 Poin	448,983,100	APBD		4 Poin	644,813,796	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai kepuasan pelayanan kantor terhadap penyediaan makanan dan minuman	DKI Jakarta	4 Poin	17,629,040	APBD		4 Poin	224,970,004	

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai kepuasan pelayanan terhadap Pengadaan Alat Uji Laboratorium	DKI Jakarta	4 Poin	526,762,356	APBD		6 Jenis	4,559,683,915	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai kepuasan pelayanan Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	DKI Jakarta	4 Poin	312,934,520	APBD		4 Poin	400,190,760	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai kepuasan pelayanan terhadap penyediaan mesin fotokopi	DKI Jakarta	4 Poin	23,812,800	APBD		4 Poin	37,513,400	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Keamanan Kantor	DKI Jakarta	4 Poin	352,614,132	APBD		4 Poin	360,987,948	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah KDO/KDO Khusus yang memiliki surat izin - Jumlah unit KDO/KDO Khusus yang laik jalan/berfungsi	DKI Jakarta	- 6 Unit -7 Unit	42,129,685	APBD		7 Unit	57,270,993	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah peralatan perlengkapan kerja yang terpelihara - Jumlah peralatan dan perkakas kerja laboratorium yang di pelihara - jumlah peralatan laboratorium yang dikalibrasi	DKI Jakarta	- 7 Jenis - 2 Jenis - 3 Paket	822,498,870	APBD		4 Poin	1,079,630,983	
Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	XX	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Nilai kepuasan layanan kebersihan kantor - Nilai Kepuasan Pelayanan Kantor terhadap Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor - Jumlah bangunan/gedung yang laik fungsi	DKI Jakarta	- 4 Poin - 4 Poin - 1 Gedung	555,472,652	APBD		4 Poin	528,040,835	

Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	A	X	X X	0 1	1. 0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laporan kinerja petugas kantor/lapangan	DKI Jakarta	12 Laporan	58,769,022	APBD		4 Poin	58,769,022	

KETERANGAN;

Kolom 1	Diisi dengan Nama PD/UKPD
Kolom 2	Diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai dengan Kodefikasi Nomenklatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
Kolom 3	Diisi dengan uraian nama urusan pemerintah daerah, uraian nama bidang urusan pemerintah daerah; sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, uraian judul program yang direncanakanm uraian judul kegatan dan uraian judul sub kegiatan yang direncanakan
Kolom 4	Diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, sebagaimana tercantum dalam renstra atau yang telah disesuaikan berdasarkan renja tahun 2021
Kolom 5	Diisi dengan lokasi kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2022
Kolom 6	Diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2022 dari Perda RPJMD dan/atau Renstra yang telah disesuaikan berdasarkan Renja tahun 2021
Kolom 7	Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2022
Kolom 8	Diisi dengan keterangan sumber dana yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan pada tahun 2022, antara lain APBD/DAK/BLUD/Pinaman/Lainnya
Kolom 9	Diisi dengan catatan atas program/kegiatan/sub kegiatan yang diusukan (program/kegiatan/sub kegiatan lanjutan, program/kegiatan/sub kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, Priortas hasil analisa kebutuhan, dsb)
Kolom 10	Diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan/sub kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2023
Kolom 11	Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2023

PENUTUP 4

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2022. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dengan mempedomani perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Fungsi Renja Perubahan 2021 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta terutama kegiatan :

1. Pendampingan Industri Kreatif
2. Fasilitasi Pemasaran Produk Industri IKM dan Industri Kreatif
3. Pendampingan Pendaftaran HKI
4. Pendampingan Sertifikasi Halal
5. Pendampingan Desain Kemasan
6. Penyelenggaraan Pameran
7. Partisipasi Pada Pameran
8. Pembuatan Akta Pendirian Koperasi
9. Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Pusat
10. Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Utara
11. Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Barat
12. Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Selatan
13. Penyelenggaraan Bazaar UKM di Wilayah Jakarta Timur
14. Penyelenggaraan Bazaar UKM di Kepulauan Seribu
15. Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Pusat
16. Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Utara

17. Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Barat
18. Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Selatan
19. Pembinaan Kewirausahaan di Wilayah Jakarta Timur
20. Pembinaan dan Pendampingan UKM di Wilayah Kepulauan Seribu
21. Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Pusat
22. Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Utara
23. Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Barat
24. Penataan Sarana dan Prasarana PKL di Wilayah Jakarta Selatan
25. Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Pusat
26. Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Utara
27. Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Barat
28. Penumbuhan Wirausaha Industri Baru di Wilayah Jakarta Selatan
29. Penumbuhan dan Pendampingan Wirausaha Industri Baru di Kepulauan Seribu
30. Pendampingan Desain Kemasan di Wilayah Kepulauan Seribu
31. Pendampingan Fasilitasi Sertifikasi Merek di Wilayah Kepulauan Seribu
32. Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal di Wilayah Kepulauan Seribu
33. Partisipasi Pameran Produk Unggulan di Kepulauan Seribu
34. Pilot Plant Instalasi Pembuatan Garam di Wilayah Kepulauan Seribu
35. Pelatihan Pelatihan/Bimtek Bagi Koperasi/UKM/IKM

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Anggaran pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 akan dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2021;

3. Pelaksanaan DPA Tahun 2021 akan dimonitoring setiap bulan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta setiap 3 bulan. Pada akhir tahun pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 akan dievaluasi sebagai bahan penyusunan Renja 2022.

Selanjutnya, Perubahan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 akan dijabarkan ke dalam Rencana Aksi 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi DKI Jakarta

Elisabeth Ratu Rante Allo
NIP 197009241998032004